



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**

LAPORAN

**KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
2025**





**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2025**



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025, merupakan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPPKB yang mendukung terwujudnya *good governance* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. LKjIP ini merupakan laporan tahunan yang disusun sebagai akuntabilitas publik guna mempertanggungjawabkan kinerja atas keberhasilan ataupun adanya penyulit untuk pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan serta sasaran strategis, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025.

Penyusunan laporan ini berdasar pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Keberhasilan capaian kinerja tahun 2025 akan dijadikan parameter capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara dimasa yang akan datang sesuai dengan visi DPPKB yaitu Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja yang menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauhmana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:



NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	KRITERIA / KODE
1	Meningkatnya Peran Stakeholder dalam Program BANGGA KENCANA	Cakupan Stakeholder Yang Terlibat Dalam Program BANGGA KENCANA	Persen	45	58,2	129,3	Sangat Baik
2	Meningkatnya kesadaran ber-KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS)	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49 Tahun)	Angka	2, 14	2,16	99,1	Sangat Baik
3	Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	Nilai	63	73,5	116,67	Sangat Baik
4	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	Nilai	85,55	63,78	75	Baik
5	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100	100	100	Sangat Baik
6	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30 (Baik)	88,58	100,3	Sangat Baik
7	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100	100	100	Sangat Baik
8	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3	3,8	126,7	Sangat Baik
9	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1	1	100	Sangat Baik
10	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100	86,6	86,6	Baik
11	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100	100	100	Sangat Baik



12	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48	48	100	Sangat Baik
13	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (Tinggi)	3,7	100	Sangat Baik
14	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77	65,59	85,2	Baik
15	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65	71,51	110	Sangat Baik
16	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100	96,85	96,85	Sangat Baik
17	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting	Persen	14,1	14,3	98,6	Sangat Baik

Didalam Laporan LKjIP terdapat tabel perbandingan Indikator Kinerja Utama antara Kabupaten, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional yaitu :

1. Perbandingan **Angka Kelahiran Total (TFR) per Wanita Usia Subur (15-49 Tahun)** tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

NO	LOKASI	TFR TAHUN 2024	TFR TAHUN 2025
1	Indonesia	2,11	2,12
2	Provinsi Kalimantan Timur	2,17	2,13
3	Kabupaten Kutai Kartanegara	2,24	2,16
4	Berau	2,20	2,22
5	Paser	2,21	2,22
6	Kota Balikpapan	2,19	2,07
7	Kota Samarinda	1,95	2,02
8	Kota Bontang	2,10	2,10
9	Kutai Barat	2,14	2,13
10	Kutai Timur	2,09	2,17
11	Penajam Paser Utara	2,25	2,22
12	Mahakam Ulu	2,26	2,25

Sumber data: Hasil Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia/PK 2024 dan 2025

2. Perbandingan Angka **Indeks Pembangunan Keluarga** tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional;

NO	LOKASI	iBangga/IPK TAHUN 2024	iBangga/IPK TAHUN 2025
1	Indonesia	62,40	67,3
2	Provinsi Kalimantan Timur	65,51	73,6
3	Kabupaten Kutai Kartanegara	66,96	73,5
4	Berau	63,29	69,4
5	Kota Balikpapan	65,43	77,2
7	Kota Samarinda	65,66	73,4
8	Kota Bontang	64,62	77,3
9	Kutai Barat	64,45	68,9
10	Kutai Timur	65,56	69,0
11	Mahakam Ulu	66,31	68,8
12	Paser	63,79	71,8
13	Penajam Paser Utara	66,20	72,6

Sumber: Hasil Pemutakhiran Data Keluarga 2024 dan 2025

Capaian Indeks Pembangunan Keluarga/iBangga tahun 2025 berdasarkan Hasil Survey Pemutakhiran Data Keluarga 2025 di tingkat Kabupaten/Kota rata-rata mengalami peningkatan dari tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh adanya sinergi antara kebijakan pemerintah pusat, komitmen pemerintah daerah, dan partisipasi aktif masyarakat. Adapun faktor pendorong utamanya meliputi Penguatan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKA), dan Penguatan Dimensi Interaksi dan Harmonisasi Keluarga.

3. Realisasi Anggaran

No	Uraian Anggaran	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran 2025	Persentase
1	Belanja Pegawai	7.609.708.964	6.557.364.079	86,17
2	Belanja Barang & Jasa	16.063.727.117	13.790.197.765	85,84
3	Belanja Bantuan Sosial	18.900.000	14.400.000	76,19
4	Belanja Modal	206.558.000	101.376.350	49,07
	Jumlah	23.898.894.081	20.463.338.194	85,62



KATA PENGANTAR

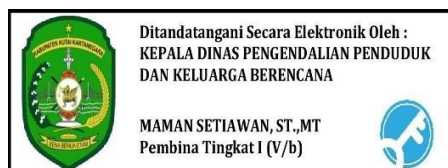
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program/kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKjIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat diperlukan demi penyempurnaannya. Selanjutnya kami berharap bahwa LKjIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 bisa dijadikan salah satu bahan evaluasi kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara untuk perbaikan secara berkesinambungan sebagai ikhtiar meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Di Buat di : Kutai Kartanegara

Tenggarong, 25 Februari 2026





DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
1.3 Permasalahan dan Isu Strategis.....	4
1.4 Uraian Singkat Organisasi.....	6
1.5 Sitematika Penyajian LKjIP	25
BAB II PERENCANAAN KINERJA	27
2.1 Perencanaan Strategis.....	27
2.2 Rencana Kinerja, Program Dan Kegiatan Tahun 2025.....	31
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	38
A. Capaian Kinerja Organisasi	38
3.1. Pencapaian Indikator Tujuan Meningkatnya Pembangunan Keluarga Melalui Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	42
3.2. Pencapaian Indikator Sasaran Meningkatnya Peran Stakeholder dalam Program BANGGA KENCANA.....	43
3.3. Pencapaian Indikator Sasaran Menurunnya Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS (15-49 Tahun).....	44
B. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (SDM, Dana, Sarana dan Prasarana).....	52
Analisa Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	58
C. Realisasi Anggaran Tahun 2025	
BAB IV PENUTUP	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran	89
LAMPIRAN	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga

pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
- 6) Peraturan BKKBN Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah.
- 7) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;
- 8) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2011, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 21);
- 9) Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- 10) Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

1.3.1 Tugas Pokok

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah.

1.3.2 Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan program kerja di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. mengoordinasikan penyusunan laporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
5. memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
6. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati baik secara tertulis maupun lisan.

1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

1.4.1 Permasalahan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara, tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, karena menyangkut Pembangunan Sumber Daya Manusia. Masalah Utama/Pokok dan mendasar dalam Pembangunan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Rendahnya Indeks Pembangunan Keluarga, dimana yang menjadi permasalahan adalah Masih tingginya Angka Total Fertility Rate (TFR) di Kabupaten Kutai Kartanegara yang berasal dari akar masalah Akses Pelayanan Yang Kurang, Kuantitas dan Kualitas Tenaga Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB serta Kader KB yang belum maksimal, Kurangnya Sarana Prasarana Media KIE.

Tabel T-B.35 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO (1)	PERMASALAHAN POKOK (2)	PERMASALAHAN (3)	AKAR MASALAH (4)
1	Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA)	Belum optimalnya Basis data Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA) antar Stakeholder	Belum optimalnya pendataan serta belum adanya sinkronisasi data antar stakeholder
2	Rendahnya pemahaman masyarakat tentang Keluarga Berencana (KB)	Kurangnya Sarana Prasarana Media Advokasi, Komunikasi, Informasi (KIE)	Pembiayaan pembangunan gedung dan sarana / prasarana serta fasilitas yang

		Belum Optimalnya pengelolaan Kampung Berkualitas (KB)	Pengelolaan Kampung KB masih dilakukan secara parsial antar stakeholder
		Kuantitas dan Kualitas Tenaga Penyuluh KB serta Kader KB yang belum sesuai standart	Kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh KB dan petugas lapangan KB serta Kader KB yang belum maksimal
3	Tidak adanya insentif dan operasional untuk kader kelompok ketahanan keluarga	Tidak atau belum diusulkannya insentif dan operasional bagi kader kelompok ketahanan keluarga	Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan kelompok ketahanan keluarga

Berdasarkan pemetaan permasalahan diatas, kami sampaikan juga faktor pendukung yang menyebabkan timbulnya permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Masih lemahnya penyelenggaraan reformsi birokrasi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - a. Pelayanan administrasi perkantoraan memang telah sepenuhnya dilaksanakan, namun masih terdapat beberapa layanan yang belum bisa terlaksana maksimal.
 - b. Kurangnya sarana dan prasarana aparatur sebagai pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, berdasarkan data dari pengurus barang hanya terdapat 80 % sarana dan prasarana dalam kondisi baik, sehingga perlu penambahan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.
 - c. Masih kurangnya kompetensi SDM Aparatur, hal ini karena belum adanya pendidikan dan pelatihan teknis maupun fungsional yang memadai bagi aparatur DPPKB.

1.4.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari analisis perkembangan dan masalah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio KB Aktif serta Pembangunan dan Pengembangan Kampung KB di Kabupaten Kutai Kartanegara, adalah:

1. Pengaturan kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan sesuai dengan hak reproduksi.
2. Perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
3. Mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Keluarga yang berkualitas menghasilkan keluarga yang berketahanan.

1.5 Uraian Singkat Organisasi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten (DPPKB) Kutai Kartanegara dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Adapun susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang terdiri dari unsur pimpinan, sekretariat, bidang-bidang teknis, kelompok jabatan fungsional, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Berikut adalah rincian struktur organisasi DPPKB :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat, membawahkan dan mengoordinasikan Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
- 3) Bidang Pengendalian Penduduk ;
- 4) Bidang K B
- 5) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
- 7) UPTD

Berdasarkan susunan organisasi DinasPengendalian Penduduk dan Keluarga



Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Kartanegara, diuraikan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1) Kepala Dinas;

Kepala Dinas memiliki tugas mengoordinasikan perumusan alternatif kebijakan Daerah berbasis data dan informasi, serta melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan program kerja di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. mengoordinasikan penyusunan laporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
- f. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati baik secara tertulis maupun lisan.

2) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris tugas menyajikan data menjadi informasi, serta mengoordinasikan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan urusan umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan penganggaran, keuangan dan aset. Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian, serta penyusunan program dan keuangan;
- b. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian, serta penyusunan program dan keuangan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan E-Government, kompilasi Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, dan Perjanjian Kinerja/, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan

perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);

d. mengoordinasikan dan menghimpun penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKPJ, LKPD, LKjIP dan LPPD), Laporan Penyelenggaraan SPIP, dan laporan kinerja lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

e. mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan :

- administrasi umum Perangkat Daerah;
- pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah;
- penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah;
- pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah;
- administrasi kepegawaian Perangkat Daerah;
- perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah;
- administrasi barang milik Daerah pada Perangkat Daerah; dan
- administrasi keuangan Perangkat Daerah.

f. mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN, melaksanakan dan melaporkan progres penataan dan penertiban aset perangkat daerah, mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian, serta penyusunan program dan keuangan;

g. memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan

h. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan.

3). Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Sekretaris. Kepala Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menghimpun dan mengumpulkan data, serta merencanakan, melaksanakan, memonitoring, dan mengevaluasi urusan umum, ketatalaksanaan, dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pengumpulan dan penghimpunan data urusan umum, ketatalaksanaan, dan kepegawaian;
- b. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis dan administrasi urusan umum, ketatalaksanaan, dan kepegawaian;
- c. melaksanakan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan E Government, kompilasi Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, dan Dokumen Kinerja Pelaksana (Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Individu, Pengukuran Kinerja, dan Sasaran Kinerja Pegawai), keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
- d. menghimpun dan menyusun Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Dokumen Kinerja Pelaksana (Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Individu, Pengukuran Kinerja, dan Sasaran Kinerja Pegawai), Rekonsiliasi dan Laporan Aset, dan laporan kinerja lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- e. merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi sub kegiatan:
 - (i) penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - (ii) penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, serta bahan/material;
 - (iii) fasilitasi kunjungan tamu;
 - (iv) penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah;
 - (v) penatausahaan arsip dinamis pada Perangkat Daerah;
 - (vi) dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Perangkat Daerah;



- (vii) pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional atau lapangan;
- (viii) pengadaan alat besar, alat angkutan darat tak bermotor, mebel, peralatan dan mesin lainnya;
- (ix) pengadaan aset tetap lainnya dan aset tak berwujud;
- (x) pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya, sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, serta sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya;
- (xi) penyediaan jasa surat menyurat, komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- (xii) penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, serta pelayanan umum kantor;
- (xiii) penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan perorangan dinas/ kendaraan dinas jabatan serta kendaraan dinas operasional/lapangan;
- (xiv) penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perijinan alat besar, serta alat angkutan darat tak bermotor, pemeliharaan mebel, peralatan dan mesin lainnya;
- (xv) penyediaan jasa pemeliharaan aset tetap lainnya dan aset tak berwujud;
- (xvi) penyediaan jasa pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya, sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya, serta tanah;
- (xvii) peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai;
- (xviii) pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya;
- (xix) pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian (membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kinerja Pegawai, rekapitulasi kehadiran, laporan kinerja pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, usul kenaikan pangkat, Masa Persiapan Pensiun, Asuransi Kesehatan, Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, Kartu Pegawai, Kartu Isteri/Kartu Suami, penghargaan, pemberian sanksi, cuti, pengembangan kompetensi kepegawaian);
- (xx) koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian;

- (xxi) monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai;
 - (xxii) pemulangan pegawai yang pensiun dan yang meninggal dalam melaksanakan tugas;
 - (xxiii) pemindahan tugas pns;
 - (xxiv) pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi; dan
 - (xxv) sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
- f. melaksanakan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN, serta melaksanakan tata kelola arsip;
 - g. menyusun laporan urusan umum, ketatalaksanaan, dan kepegawaian;
 - h. memberikan penilaian terhadap kinerja jabatan pelaksana; dan
 - i. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan.

3) Bidang Pengendalian Penduduk

Bidang Pengendalian Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengendalian Penduduk yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas menyajikan data menjadi informasi serta mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, kerjasama pendidikan kependudukan, serta data dan informasi. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, kerjasama pendidikan kependudukan, serta data dan informasi;
- b. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, kerjasama pendidikan kependudukan, serta data dan informasi;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan E-Government, Standar Operasional Prosedur, dan Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi

- publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
- d. mengoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, serta Laporan Penyelenggaraan SPIP urusan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, kerjasama pendidikan kependudukan, serta data dan informasi;
- e. mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan:
- pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk
 - pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kabupaten/kota
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja bidang pengendalian penduduk yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan dan/atau inspektorat daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas laporan harta kekayaan penyelenggara negara (lhkpn) dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (lhkasn), serta melaksanakan tata kelola arsip;
- g. mengoordinasikan penyusunan laporan urusan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, kerjasama pendidikan kependudukan, serta data dan informasi;
- h. memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
- i. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan.

4) Bidang KB

Bidang KB dipimpin oleh seorang Kepala Bidang KB yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang KB mempunyai tugas menyajikan data menjadi informasi serta mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (AKIE), pembinaan dan peningkatan kesertaan ber- KB, serta jaminan ketersediaan kontrasepsi dan pelayanan KB. Dalam

melaksanakan tugas Kepala Bidang KB mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (AKIE), pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB, serta jaminan ketersediaan kontrasepsi dan pelayanan KB;
- b. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (AKIE), pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB, serta jaminan ketersediaan kontrasepsi dan pelayanan KB;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan E-Government, Standar Operasional Prosedur, dan Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
- d. mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, serta Laporan Penyelenggaraan SPIP urusan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (AKIE), pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB, serta jaminan ketersediaan kontrasepsi dan pelayanan KB;
- e. mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan:
 - pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan kb sesuai kearifan budaya lokal;
 - pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
 - pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan kb di Daerah kabupaten/kota; dan
 - pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.
- f. mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Bidang Keluarga Berencana yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN, serta melaksanakan tata kelola arsip;

- g. mengoordinasikan penyusunan laporan urusan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (AKIE), pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB, serta jaminan ketersediaan kontrasepsi dan pelayanan KB;
- h. memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
- i. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan.

5) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas menyajikan data menjadi informasi serta mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan pembinaan ketahanan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan pembinaan ketahanan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- b. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan pembinaan ketahanan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan E-Government, Standar Operasional Prosedur, dan Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
- d. mengoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, serta Laporan Penyelenggaraan SPIP urusan pembinaan ketahanan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- e. mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan :
 - pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan

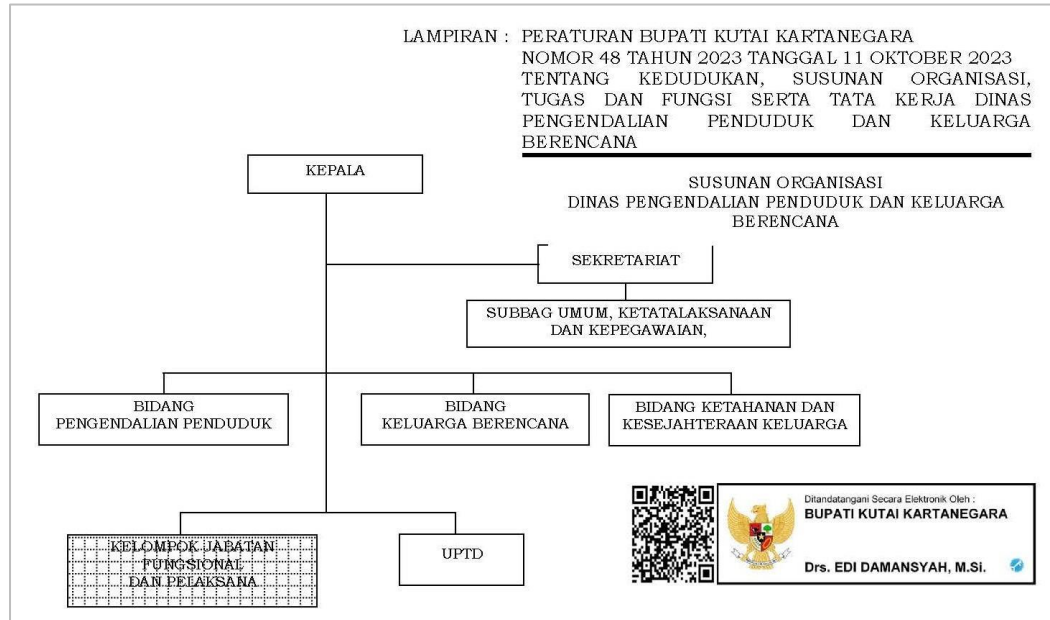
- pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/ kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- f. mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN, serta melaksanakan tata kelola arsip;
- g. mengoordinasikan penyusunan laporan urusan pembinaan ketahanan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- h. memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
- i. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan.

6) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sekelompok Jabatan Fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- b. Kelompok Jabatan Pelaksana terdiri atas sekelompok Jabatan Pelaksana yang melaksanakan pelayanan publik, administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- c. Tugas dan fungsi Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada setiap jenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- e. Sistem dan Mekanisme Kerja kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

7) UPTD

Gambar 1.5 Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara



2.1 Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara

2.1.1 Sumber Daya Manusia

Guna menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara di dukung oleh sumber daya manusia yang memadai. Untuk dapat menghasilkan perencanaan yang baik dan berkualitas, dibutuhkan aparatur dengan disiplin ilmu yang berbeda. Berikut adalah jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;

1) Jumlah dan Komposisi SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

Komposisi SDM DPPKB dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan dan kepangkatan, baik untuk pegawai negeri sipil (PNS) maupun Non PNS. Berikut adalah rincian jumlah dan komposisi SDM berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 2.1 : Jumlah dan Komposisi SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan DPPKB, Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

Tingkat Pendidikan	PNS	P3K	Non PNS/PLKB	Jumlah
SLTA	12	5	13	30
Diploma III	1			1
Strata 1	24	3		27
Strata 2	10			10
Total	47	8	13	68

Sumber : Sub.Kepegawaian DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa mayoritas pegawai memiliki tingkat pendidikan minimal strata 1, menunjukkan kualitas SDM yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program strategis DPPKB. Pegawai dengan pendidikan SLTA dan Diploma III biasanya mendukung kegiatan administratif dan teknis di lapangan.

2) Jumlah dan komposisi SDM Berdasarkan Golongan

Jumlah dan Komposisi SDM DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara Berdasarkan Golongan sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Jumlah dan Komposisi SDM Menurut Golongan DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Golongan	PNS	P3K	Non PNS	Jumlah
1	Golongan V		5		5
2	Golongan IX		3		3
3	Golongan II	12			12
4	Golongan III	25			25
5	Golongan IV	10			10
	Total	47	8		55

Sumber: Data Kepegawaian DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025

Dari data tersebut terlihat bahwa struktur SDM DPPKB cukup proporsional antara jenjang pendidikan dan kepangkatan, yang disesuaikan dengan kebutuhan

operasional di berbagai bidang. Penyuluh Lapangan KB sebagai garda terdepan di lapangan didukung oleh pegawai dengan golongan dan tingkat pendidikan yang relevan.

2.1.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu elemen utama yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai berperan penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, operasional administrasi dan kegiatan teknis lainnya.

Tabel 2.3 Data Sarana dan Prasarana DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah		1	Baik	
2	Station Wagon	Avanza / 1.3 GM/T	2	Rusak Ringan	
3	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lainnya	Toyota / Rush 1500	1	Rusak Ringan	
4	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lainnya	Toyota / Avanza 1300	2	Rusak ringan	
5	Sepeda Motor	Honda / Vario 125	41	Baik	
6	Sepeda Motor	Honda / 160 Csb	9	Baik	
7	Sepeda Motor	Honda / CRF 150 L	18	Baik	
8	Handy Cam	SONY / DVDGIE	1	Baik	
9	Printer	Epson / LQ300	5	Baik	
10	Printer	CANON / IP1980	3		
11	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	Donati / Kursi Sopa	1	Baik	
12	Alat Studio Lainnya	Maono / 1x Mixer USB Podcast Recording tech PRO RT X6, 4x	1	Baik	
13	Video Conference	Logitech PTZ PRO 2 / Camera 1080p HD	1	Baik	
14	Video Conference	JETE / 1080	1	Baik	
15	Tenda	Rainbow	3	Baik	
16	Lap Top	AXIO/MY Book L5 (8N2)	23	Baik	
17	Laptop	Acer / Core i5	3	Baik	
18	P.C Unit	Axio / Ram 8 GB	2	Baik	
19	P.C Unit	Axio / One Pro K5-24 (16N5)	15	Baik	
20	Printer	Epson / L5290 All-in-One	1	Baik	
21	Printer	EPSON ECOTANK / L3210	1	Baik	



No	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
22	Printer	Epson / L3211	4	Baik	
23	Printer	Brother / P250 W	20	Baik	
23	Printer	Brother / P250 W	20	Baik	
24	Printer	Workforce / WF 100	6	Baik	
25	Scanner	Brother ADS / 330 w	20	Baik	
26	Modem	Prolink / DL 7303	2	Baik	
27	A.C. Split	Panasonic / YN9WKJ	9	Unit	
28	Kipas Angin	SEKAI / 2676	2	Unit	
29	Kursi Fiber Glas/Plastik	Krisbow / Kursi Lipat	12	Baik	
30	Rak Peralatan	Brother / Rak Serbaguna	16	Baik	
31	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Donati / ecco zova	20	Baik	
32	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Expo / MT3001 ND	21	Baik	
33	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Donati ester / WS 2pF	7	baik	
34	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Donati / DOD 20	6	Baik	
35	Filing Cabinet Besi	Brother / 4 Laci	6	Baik	
36	Rak Besi	Brother / Rak	21	Baik	
37	Lemari Besi/Metal	Brother / B.304	21	Baik	
38	Lemari Penyimpan	Almari / B 202	20	Baik	
39	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	Brother / STandar F4	8	Baik	
40	Lemari Kaca	Lemari Kaca / Etalase	2	Baik	
41	Kursi Fiber Glas/Plastik	Krisbow / Kursi Lipat	12	Baik	
42	A.C. Split	Panasonic / CU-LN9WKJ Spit	7	Baik	
43	Kipas Angin	Sharp / PJ-A36TV-W	2	Baik	
44	Microphone/Wireless MIC	KREZT / DT D-37 H	4	Baik	
45	Laptop	Acer / 1165 G7	8	Baik	
46	Printer	Epson / L3250	10	Baik	
47	Modem	Orbit / 5 G H1	6	Baik	
48	Tenda Pleton	Consina / Tenda Ploton	2	Baik	
49	Lampu Gynaecologi	blizmad / LED Lamp Standing	9	Baik	
50	A.C. Split	Panasonic / YN18AKJ	9	Baik	
51	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON / L 2359	7	Baik	
52	Kursi Rapat	CHITOSE	20	Baik	
53	Rak Besi	Alba / SR 4	10	Baik	
54	Lemari Buku	Kokubi	15	Baik	
55	Lemari Penyimpan	Almari / B 202	10	Baik	
56	Mesin Ketik Manual	Brother / Standar F4	15	Baik	
57	Lemari Besi/Metal	Brother / B.304	11	Baik	
58	Kipas Angin	KDK	6	Baik	
59	Alat Kedokteran umum	Balmed / BM 2506	8	Baik	
60	Server	LG	1	Baik	



No	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
61	Notebook	Lenovo / G40 - 70	30	Baik	
62	Rak Kayu	Mitsubithi / L33N Triplek	11	Baik	
63	White Board	Pitex / Megnetis Formika	6	Baik	
64	Meja Rapat	High Point	22	Baik	
65	Slide Projector	Toshiba	3	Baik	
66	Lemari Kayu	Kokubi / Lemari Buku	6	Baik	
67	Transportable Water Pump	Sanyo	1	Baik	
68	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jl. Jend.Sudirman No.75 Kec.Tenggarong	1	Rusak Berat	
69	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Balai Penyuluh Keluarga Berencana Jl. Riduansyah RT 01Desa Kembang Janggut Kecamatan Kembang Janggut	1	Baik	
70	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Balai Penyuluh Keluarga Berencana Jl. Palancari RT 25 Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak	1	Baik	
71	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Balai Penyuluh Keluarga Berencana Jl Ir Sukarno RT 06 Kelurahan Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa	1	Baik	
71	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Balai Penyuluh Keluarga Berencana Jl. Jendral Sudirman Gang Swadaya RT 03 Desa Sebulu Moderen Kecamatan Sebulu	1	Baik	
73	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Balai Penyuluh Keluarga Berencana Jl. Udang No 28 RT 28 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong (Koplek Kantor Camat Tenggarong)	1	Baik	
74	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Balai Penyuluh Keluarga Berencana Desa Summersari Kecamatan Loa Kulu	1	Baik	



No	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
75	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Balai Penyuluh Keluarga Berencana	1	Baik	
		Jl. KH Dewantara RT 18 (Komplek Kantor Camat Kota Bangun)			
76	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Balai Penyuluh Keluarga Berencana	1	Baik	
		Jl Sukarno-Hata KM 4 (Komplek Perkantoran kantor Camat Loa Janan)			
77	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Balai Penyuluh Keluarga Berencana	1	Baik	
		Jl.Balikipapan - Handil II RT 05 Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Samboja			
78	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Balai Penyuluh Keluarga Berencana	1	Baik	
		Jl. Jongkar Raya RT 08 Desa Kahala Ilir Kecamatan Kenohan			
79	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Balai Penyuluh Keluarga Berencana	1	Baik	
		Jl. Pahlawan RT 16 Kelurahan Karang Tunggal Kec Tenggarong Seberang			
80	Pagar Permanen	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jl. Jenderal Sudirman No 2 RT 4 Kelurahan Melayu Tenggarong	1	Baik	
81	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Balai Penyuluh Keluarga Berencana Jl.Mulawarman RT 15 Desa Muara Kaman Ulu Kecamatan Muara Kaman	1	Baik	
82	Pagar Permanen	Balai Penyuluh Keluarga Berencana	1	Baik	
		Jl.Mulawarman RT 15 Desa Muara Kaman Ulu Kecamatan Muara Kaman			
83	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Balai Penyuluh Keluarga Berencana	1	Baik	
		Jl. Dinas no 7 RT 17 Desa Sebuntal Kecamatan Marang Kayu			
84	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Balai Penyuluh Keluarga Berencana	1	Baik	



No	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
		Jl. Mulawarman RT. 01, Desa Sungai Meriam, Kec. Anggana			
85	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Balai Penyuluh Keluarga Berencana Jalan Ra Kartini Rt. 001 Desa Muara Muntai Ilir Kecamatan Muara Muntai	1	Baik	
86	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Balai Penyuluh Keluarga Berencana JL.Poros Muara Wis Sebemban Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis	2	Baik	
87	Pagar Permanen	Balai Penyuluh Keluarga Berencana Jl Balikpapan Hansil II Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Samboja	1	Baik	
88	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Balai Penyuluh Keluarga Berencana Jl Mulawarman RT 1 Desa Sungai Mariam	1	Baik	
89	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Balai Penyuluh Keluarga Berencana Jl.Corong RT 16 Kelurahan Sanga Sang Dalam Kecamatan Sanga -Sanga	1	Baik	
90	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Balai Penyuluh Keluarga Berencana Jl Dinas No 7 RT 17 Desa Sebuntal Marangkayu	1	Baik	
91	Pagar Permanen	Balai Penyuluh Keluarga Berencana Jl. Palancari RT 25 Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak	1	Baik	
92	Pagar Permanen	Balai Penyuluh Keluarga Berencana Jl Mulawarman RT 1 Desa Sungai Mariam	1	Baik	
93	Pagar Permanen	Balai Penyuluh Keluarga Berencana Jl.Corong RT 16 Kelurahan Sanga Sang Dalam Kecamatan Sanga -Sanga	1	Baik	
94	Pagar Permanen	Balai Penyuluh Keluarga Berencana	1	Baik	



No	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
		Jl Dinas No 7 RT 17 Desa Sebuntal Marangkayu			
95	Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	Balai Penyuluh Keluarga Berencana	1	Baik	
		Jl. Gas Alam Desa Batu Batu Kec. Muara Badak			
96	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Kecil	Balai Penyuluh Keluarga Berencana	1	Baik	
		Desa Kahala Ilir Kecamatan Kenohan			
97	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Kecil	Balai Penyuluh Keluarga Berencana	1	Baik	
		Komplek Kantor Camat Kota Bangun			
98	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Kecil	Balai Penyuluh Keluarga Berencana	1	Baik	
		Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang			
99	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Kecil	Balai Penyuluh Keluarga Berencana Komplek Kantor Camata Samboja Jl Samarinda Balikpapan	1	Baik	
100	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Kecil	Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Sebulu	1	Baik	
101	Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA	Balai Penyuluh Keluarga Berencana	1	Baik	
		Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang			
102	Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA	Balai Penyuluh Keluarga Berencana Desa Kahala Ilir Kecamatan Kenohan	1	Baik	
103	Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA	Balai Penyuluh Keluarga Berencana Komplek Kantor Camat Sambija	1	Baik	
104	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang	Balai Penyuluh Keluarga Berencana Desa Kembang Janggut Kecamatan Kembang Janggut	1	Baik	
105	Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	Balai Penyuluh Keluarga Berencana Desa Kembang Janggut Kecamatan Kembang Janggut	1	Baik	
106	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Sebulu	1	Baik	

Sumber: KIB, DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025

Data Sarana dan Prasarana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Kartanegara mencakup berbagai aset yang

mendukung operasional dan pelayanan program di lapangan. Sarana transportasi meliputi kendaraan operasional seperti station wagon Toyota Avanza, sepeda motor, dan mesin genset, yang seluruhnya dalam kondisi baik. Selain itu, terdapat peralatan kantor berupa PC unit, laptop, printer, proyektor, whiteboard, dan kursi rapat yang tersebar di berbagai kantor dan mendukung kegiatan administrasi serta pelayanan. DPPKB juga memiliki sejumlah bangunan kantor permanen yang tersebar di beberapa lokasi strategis, seperti Kecamatan Tenggarong, Muara Badak, dan Muara Muntai, dengan sebagian besar bangunan dalam kondisi baik. Infrastruktur pendukung lainnya meliputi jaringan distribusi tegangan listrik kapasitas 1-20 KVA dan jaringan sambungan ke rumah kapasitas kecil yang tersebar di wilayah pedesaan seperti Desa Bhuana Jaya, Desa Kembang Janggut, dan Kecamatan Kenohan. Dengan kondisi sarana dan prasarana yang baik, DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kesiapan yang memadai untuk mendukung kegiatan operasional dan pelayanan program pengendalian penduduk serta keluarga berencana di wilayah tersebut.

1.5.3 Pembiayaan

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada urusan Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana pada tahun 2025 dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp23.898.894.081,00 dan terealisasikan sebesar Rp20.463.338.194,00 atau 85,62 %.

No	Uraian Anggaran	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran 2025	Persentase
1	Belanja Pegawai	7.609.708.964	6.557.364.079	86,17
2	Belanja Barang & Jasa	16.063.727.117	13.790.197.765	85,84
3	Belanja Bantuan Sosial	18.900.000	14.400.000	76,19
4	Belanja Modal	206.558.000	101.376.350	49,07
	Jumlah	23.898.894.081	20.463.338.194	85,62

E. SISTIMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya mengkomunikasikan pencapaian kinerja SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama tahun 2025, Capaian Kinerja dibandingkan dengan Penetapan Kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan dan lima tahunan organisasi. Analisis capaian kinerja terhadap rencana kerja akan memungkinkan teridentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) untuk perbaikan kinerja pada masa yang akan datang, dengan mekanisme seperti tersebut maka sistematika penyajian LKJIP SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan dan atau

kegagalan/peningkatan dan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis Tahun 2021-2026

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan Misi merupakan panduan yang memberikan pandangan kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Secara ringkas substansi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Penjabaran daripada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021–2026 dan diturunkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021–2026. Adapun Visi Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan RPJMD 2021–2026.

Visi Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 yaitu ***“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera, dan Berbahagia”***.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi

pemerintah, sebagai penjabaran Visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai Visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

“Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya”

Dalam penjabaran misi tersebut Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah menuangkan ke dalam Tujuan dan Sasaran perangkat Daerah sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra DPPKB.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan tersebut selaras dengan visi, misi dan prioritas yang akan dicapai.

Sasaran adalah merupakan rangkaian capaian perencanaan Strategik, sehingga diharapkan dapat mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA). Sebagaimana visi dan misi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 – 2026 sebagai berikut:

1. Pencapaian Misi I : Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani. Dalam pelaksanaan Misi ini, Tujuan yang ingin dicapai adalah : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah yang Berkualitas dan Melayani, sedangkan sasarannya adalah Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pembangunan.
2. Pencapaian Misi II : Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya.

Adapun Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
01	Mewujudkan penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara yang tumbuh seimbang,	Meningkatnya kesadaran ber-KB bagi Pasangan Usia Subur	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49 Tahun)



	berkualitas dan berdaya saing	(PUS)	Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR) cara modern
			Meningkatnya Angka Peserta KB Baru
			Menurunnya Angka Unmetneed
			Meningkatnya Angka Akseptor MKJP
			Menurunnya Angka Drop Out Akseptor
		Meningkatnya Peran Stakeholder dalam Program BANGGA KENCANA	Cakupan Stakeholder yang terlibat dalam program BANGGA KENCANA
			Tersedianya dokumen grand design kependudukan
		Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga
			Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB
			Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB
			Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB
			Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan
			Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/ Mahasiswa
			Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah yang berkualitas dan melayani	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pembangunan	Nilai SAKIP DPPKB
			Tindak Lanjut temuan LHP BPK/ Inspektorat
			Persentase identifikasi, inventarisasi aset dalam penelusuran
			Persentase input Rencana Umum Pengadaan (RUP)



			Tingkat Kepatuhan LHKPN
			Tingkat Kepatuhan LHKSN
			Predikat tata kelola arsip

Adapun keserasian program pada Peraturan Menteri dalam Negeri No 13 Tahun 2006 dengan Program di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 sehingga dapat diketahui capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut :

Sasaran RPJMD 2021 - 2026	Indikator Sasaran	Anggaran Belanja Menurut Urusan Wajib Permendagri No. 13 Tahun 2006
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja	- Nilai SAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
Meningkatnya Kesadaran ber-KB Bagi Pasangan Usia Subur (PUS)	• Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49 tahun) • Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi (CPR) cara Modern. • Meningkatnya Angka Peserta KB Baru. • Menurunnya Angka Unmetneed • Meningkatnya Angka Akseptor MKJP. • Menurunnya Angka Akseptor Drop Out	Program Pembinaan Keluarga Berencana
Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan Keluarga	• Indeks Pembangunan Keluarga • Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB • Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber -KB • Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB • Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) • Cakupan Remaja dalam PIK-R/M • Cakupan PUS Peserta KB Anggota UPPKS Ber-KB Mandiri	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera.

Meningkatnya Peran Stakeholder dalam Program Bangga Kencana	• Cakupan Stakeholder yang terlibat dalam Program Bangga Kencana • Tersedianya Dokumen GDPK	Program Pengendalian Penduduk
---	---	-------------------------------

2.2 Rencana Kinerja, Program dan Kegiatan Tahun 2025

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan, sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun.

Rencana Kinerja Tahunan DPPKB memuat sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai oleh DPPKB pada Tahun 2025, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi pelaksanaan *Good Governance* dalam urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Rencana Kinerja Tahunan dibuat agar suatu organisasi yang dalam hal ini DPPKB dapat mencapai Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan, hal tersebut dapat dilihat apabila kinerja dari organisasi tersebut dapat dicapai. Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing dalam rangka untuk mencapai sasaran strategis organisasi.

Untuk itu dalam Rencana Kinerja Tahunan, ditetapkan beberapa indikator kinerja untuk mengukur apakah kinerja Organisasi Perangkat Daerah tersebut dapat tercapai atau tidak. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif maupun kualitatif untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dari tujuan organisasi, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan tahap setelah kegiatan selesai.

Indikator kinerja tersebut juga digunakan untuk meyakinkan bahwa terdapat kemajuan kinerja dalam rangka tercapainya Tujuan dan Sasaran DPPKB. Dalam penetapan indikator kinerja terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu : (a) spesifik dan jelas untuk menghindari kesalahan interpretasi, (b) dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif, (c) menangani aspek-aspek yang relevan, harus penting atau dapat menunjukkan keberhasilan input, output, hasil atau outcome, manfaat ataupun dampak serta proses, (d) efektif, dalam arti datanya mudah diperoleh, diolah dengan biaya yang tersedia.

Dalam Rencana Kinerja DPPKB terdapat dua macam indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja, yaitu Indikator output dan indikator outcome. Dengan membandingkan keluaran/ output dapat dianalisis apakah kegiatan yang terlaksana sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. Indikator output dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolak ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefisi dengan baik dan terukur. Sedangkan Indikator Outcome lebih utama daripada sekedar output. Walaupun output telah tercapai dengan baik, belum tentu secara outcome kegiatan telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil yang lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak.

Untuk tercapainya semua tujuan dan sasaran yang sudah dituangkan pada ketentuan Renstra tahun 2021-2026, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara membuat kebijakan-kebijakan dan menyusun program kegiatan antara lain :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
 - b. Program Pengendalian Penduduk
 - c. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
 - d. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
-
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator program IKM terdiri dari 7 Kegiatan antara lain:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program Pengendalian Penduduk dengan indikator Presentase Kebutuhan Data Informasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana Yang Tersedia Akurat dan Tepat Waktu yang ada dengan 2 Kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
- b. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota.
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan indikator program yaitu Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dengan rincian Kegiatan antara lain:
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal.
 - b. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 - c. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di daerah Kabupaten/ Kota
 - d. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pemilihan Kesertaan ber-KB
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) yang memiliki indikator Cakupan Anggota Poktan Yang Aktif Dalam Pertemuan Pembinaan BKB, BKR, BKL dengan kegiatan yaitu :
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - b. Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Berikut akan disampaikan secara terlampir Rencana Aksi (Renaksi) Tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara.

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun tersebut.

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya peran stakeholder dalam Program KKBPK	Cakupan stakeholder yang terlibat dalam program KKBPK	Persen	45	2.668.025.380
2	Menurunnya angka kelahiran total / Total Fertility Rate (TFR) per WUS (15-49) tahun	Menurunnya Angka TFR per WUS (15-49 tahun)	Persen	2,14	5.254.307.189
3	Meningkatnya pemberdayaan keluarga	Indek Pembangunan Keluarga	Nilai	63	4.888.299.900
4	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja DPPKB	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	85,55	11.088.261.612
5	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100	0
6	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30 (Baik)	0
7	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100	0
8	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3	0
9	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1	0
10	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100	0

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Anggaran (Rp)
11	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji(GEMA)"	Laporan	48	0
12	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (Tinggi)	0
13	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77	0
14	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65	0
15	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100	0
16	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting	Persen	14,1	0

2.3.2 Alokasi Anggaran

Pada tahun anggaran 2025, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan kegiatan yang bersumber dari APBD/APBN sebesar Rp. 33.924.811.101,00 dan mengalami Rasionalisasi Anggaran sehingga mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 10.025.917.020,00 melalui mekanisme perubahan pada APBD-Perubahan menjadi sebesar Rp. 23.898.894.081,00, untuk menunjang pencapaian Target Kinerja. Alokasi anggaran yang dikelola Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan jaringannya sebagaimana table 2.5 dibawah ini :



Tabel Alokasi Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Tahun 2025

Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Alokasi Anggaran	33.924.811.101	23.898.894.081	10.025.917.020

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara adalah perwujudan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada Bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

3.1.2 Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus:

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

3.1.3 Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan ordinal. Skala skala pengukuran nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
$91\% \leq 100\%$	Sangat Baik
$76\% \leq 90\%$	Baik
$66\% \leq 75\%$	Sedang
$51\% \leq 65\%$	Rendah
$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

A.1 Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	KRITERIA / KODE
1	Meningkatnya Peran Stakeholder Dalam Program BANGGA KENCANA	Cakupan Stakeholder dalam Program BANGGA KENCANA	Persen	45	58,2	129%	Sangat Baik
2	Meningkatnya Kesadaran Ber-KB Bagi Pasangan Usia Subur (PUS)	Menurunnya Angka TFR (Total Fertility Rate) per WUS (15-49 Tahun)	Angka	2,14	2,24	97,90%	Sangat Baik
3	Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka Absolut	63	66,96	106,29	Sangat Baik
4	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP DPPKB	Nilai	85,55	63,78	74,55	Sedang/Baik
5	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Forum Konsultasi Publik	Persen	100	100	100	Sangat Baik
6	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	88,30 (Baik)	88,59	100,3	Sangat Baik
7	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas Audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100	82	82	Baik
8	Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Level	3	3,827	127,57	Sangat Baik
9	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah Dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1	1	100	Sangat Baik

10	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100	86,6	86,6	Baik
11	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100	100	100	Sangat Baik
12	Terlaksananya “Gerakan Etam Mengaji (GEMA)” di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan “Gerakan Etam Mengaji (GEMA)”	Laporan	48	48	100	Sangat Baik
13	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7	3,26	88,11	Baik
14	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77	65,59	85,18	Baik
15	Meningkatkan Manajemen Birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65	71,51	110,02	Sangat Baik
16	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100	96,85	96,85	Sangat Baik
17	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting	Persen	14,1	14,3	96,60	Sangat Baik

1. Pencapaian Indikator Tujuan Meningkatnya Pembangunan Keluarga Melalui Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Secara umum berdasarkan Hasil Pengukuran Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang telah menetapkan sasaran yang akan dicapai. Sasaran tersebut selanjutnya diukur melalui indikator kinerja. Capaian Kinerja Dinas Pengendalian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3. Pencapaian Indikator Tujuan Meningkatnya Pembangunan Keluarga Melalui Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD				TARGET DAN CAPAIAN KINERJA TUJUAN PADA TAHUN 2025			KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
					2021	2022	2023	2024	2025	Pencapaian 2025	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Nilai Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka		54,91	59,33	63,34	66,96	63	73,5	117	65

Dari data yang disajikan, Indeks Pembangunan Keluarga menunjukkan kinerja yang cenderung membaik setelah awal yang rendah, dengan realisasi di tahun 2021 hanya 96,33 persen dari target dan tahun 2022 hanya 16,23 persen (angka 9,33 berbanding target 57,50). Capaian ini kemudian melampaui target di tahun 2023 dan 2024 (108,27 persen dan 111,60 persen), dan di tahun 2025 mengalami peningkatan 117 % dari target capaian 63 menjadi 73,5, yang mengindikasikan perbaikan substansial dalam pembangunan keluarga.

Capaian setiap tahun dari tahun 2025 mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan peningkatan pada tiga dimensi utama yaitu ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga. Penguatan pada dimensi ketentraman keluarga didorong oleh adanya kepemilikan jaminan kesehatan bagi setiap anggota keluarga dan terwujudnya hubungan yang harmonis, berkurangnya konflik dalam rumah tangga dan komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Peningkatan Kebahagiaan Keluarga didorong oleh interaksi yang baik dalam keluarga dan interaksi yang positif dengan lingkungan sekitar, sedangkan Peningkatan Dimensi kemandirian keluarga mencakup perbaikan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, kelangsungan pendidikan anggota keluarga, akses ke fasilitas kesehatan, dan perbaikan kondisi ekonomi keluarga.

INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA (IBANGGA)
HASIL PEMUTAKHIRAN PK-25

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	iBangga 2025	Dimensi		
				Ketentraman	Kemandirian	Kebahagiaan
356	KALIMANTAN TIMUR	BERAU	69,4	77,8	70,7	59,7
357	KALIMANTAN TIMUR	KOTA BALIKPAPAN	77,2	88,9	81,8	60,8
358	KALIMANTAN TIMUR	KOTA BONTANG	77,3	88,2	80,2	63,5
359	KALIMANTAN TIMUR	KOTA SAMARINDA	73,4	83,0	76,2	61,1
360	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI BARAT	68,9	77,5	71,7	57,4
361	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI KARTANEGARA	73,5	79,3	78,1	63,3
362	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI TIMUR	69,0	74,2	70,9	61,8
363	KALIMANTAN TIMUR	MAHAKAM ULU	68,8	78,6	64,3	63,4
364	KALIMANTAN TIMUR	PASER	71,8	80,5	73,1	61,8
365	KALIMANTAN TIMUR	PENAJAM PASER UTARA	72,6	85,5	75,0	57,2

Sumber : Hasil Pemutakhiran PK-25

2. Pencapaian Indikator Sasaran Meningkatnya Peran Stakeholder Dalam Program Bangga Kencana

Capaian pada indikator cakupan stakeholder yang terlibat dalam program BANGGA KENCANA sangat berfluktuasi. Di tahun 2021, realisasi mencapai 168,00 persen dari target, menunjukkan partisipasi yang luar biasa. Namun, di tahun 2022, capaian merosot drastis menjadi hanya 40,00 persen, sebelum akhirnya meningkat signifikan lagi di tahun 2024 menjadi 114,40 persen.

Ada beberapa faktor kunci yang mendorong tercapainya peningkatan peran stakeholder dalam program BANGGA KENCANA antara lain Partisipasi aktif dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang terlibat dalam memperluas jangkauan program, Regulasi dan Kebijakan yang Kuat seperti adanya Perpres No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang memberikan mandat yang kuat bagi stakeholder untuk terlibat langsung. Hal ini dibuktikan dengan Persentase dari total Stakeholder yang diidentifikasi terlibat dalam Program BANGGA KENCANA meliputi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Lembaga, Mitra Kerja, instansi terkait di tingkat Desa/Kelurahan. Terdapat 32 Organisasi Perangkat Daerah yang terikat dalam Berita Acara Serah Terima Data dari 55 Jumlah Stakeholder yang terlibat dalam Program BANGGA KENCANA. Capaian Kinerja meningkat dari Target capaian 45 menjadi 58,18 atau tercapai 129%.

Tabel 3.5. Capaian Kinerja Meningkatnya Peran Stakeholder Yang Terlibat Dalam Program BANGGA KENCANA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2024	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RENSTRA TAHUN 2026	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
				TARGET	REALISASI	%		
1	Meningkatnya Peran Stakeholder dalam Program BANGGA KENCANA	Cakupan Stakeholder yang terlibat dalam Program BANGGA KENCANA	45,76	45	58,2	127,2	50	129,3%

Berikut perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir untuk indikator Cakupan Stakeholder yang terlibat dalam Program BANGGA KENCANA.

Tabel 3.6. Capaian Kinerja Cakupan Stakeholder Yang Terlibat Dalam Program BANGGA KENCANA

No.	Indikator Kinerja	Capaian				2025		
		2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%
1	Cakupan Stakeholder yang Terlibat Dalam Program BANGGA KENCANA)	42	12	29	45,76	45	8,2	129,3

3. Pencapaian Indikator Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) Per WUS (15-49 Tahun)

Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49 Tahun) adalah jumlah anak rata-rata yang dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. Angka TFR di peroleh dengan menghitung banyaknya kelahiran dari perempuan umur 15-49 tahun selama periode tertentu dibagi jumlah perempuan umur 15-49 tahun pada periode yang sama. Fertilitas di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami penurunan menjadi **2,16** yang berarti keberhasilan program KB yang dijalankan pemerintah selama lebih dari 50 tahun telah meningkatkan pemahaman dan akses masyarakat terhadap alat kontrasepsi yang secara langsung

mengurangi angka kelahiran. Secara keseluruhan penurunan TFR ini mencerminkan pergeseran budaya dan peningkatan kualitas hidup, dimana pasangan lebih mengutamakan keamanan dan kualitas pengasuhan.

Tabel 3.7. Capaian Kinerja Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) Per WUS (15-49 Tahun)

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra tahun 2026	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) per WUS (15-49 Tahun)	Menurunnya Angka TFR per WUS (15-49 Tahun)	2,24	2,14	2,16	99,07	2,12	96,43%

Angka Kelahiran Total (TFR) tahun 2025 di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami penurunan sebesar 0,08 % dari Angka TFR tahun 2024.

Tabel 3.8. Capaian Kinerja Menurunnya Angka Kelahiran Total /Total Fertility Rate (TFR) per WUS (15-49 Tahun)

No.	Indikator Kinerja	Capaian				2025		
		2021	2022	2023	2023	Target	Realisasi	%
1	Menurunnya Angka TFR per WUS (15-49 Tahun)	2,53	2,39	2,13	2,24	2,14	2,16	99,07

Tabel 3.9 Perbandingan Total Fertility Rate Kabupaten, Provinsi Kaltim dan Nasional

ANGKA KELAHIRAN TOTAL (TOTAL FERTILITY RATE/TFR)
HASIL PEMUTAKHIRAN PK-25

	Target 2025	TFR 2025	ASFR						
			15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
NASIONAL	2,12	2,12	20,6	97,2	129,7	100,7	56,7	17,4	2,7

Sumber: Hasil Pemutakhiran PK-25

HASIL PEMUTAKHIRAN PK-25

No	Provinsi	Kabupaten/kota	TFR 2025	15-19	20-24	25-29	ASFR 30-34	35-39	40-44	45-49
356	KALIMANTAN TIMUR	BERAU	2,22	20,3	88,5	125,4	109,8	66,6	29,7	4,7
357	KALIMANTAN TIMUR	KOTA BALIKPAPAN	2,07	15,4	80,6	129,8	88,5	70,8	23,9	5,5
358	KALIMANTAN TIMUR	KOTA BONTANG	2,10	8,9	44,2	140,1	117,8	76,9	31,7	0,0
359	KALIMANTAN TIMUR	KOTA SAMARINDA	2,02	10,2	60,8	133,1	115,9	62,6	18,3	2,6
360	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI BARAT	2,13	16,5	87,0	110,8	100,6	70,8	39,8	0,0
361	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI KARTANEGARA	2,16	21,7	83,3	118,6	114,8	70,9	19,2	2,9
362	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI TIMUR	2,17	17,4	101,8	127,3	103,3	49,4	31,4	2,4
363	KALIMANTAN TIMUR	MAHAKAM ULU	2,25	27,2	85,6	113,4	98,4	83,5	39,8	2,7
364	KALIMANTAN TIMUR	PASER	2,22	36,5	95,8	128,5	93,5	67,3	20,7	1,6
365	KALIMANTAN TIMUR	PENAJAM PASER UTARA	2,22	26,3	102,3	135,6	86,4	62,8	24,8	4,2

Dari hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga (PK2025), Angka TFR Nasional di tahun 2025 adalah 2,12, sedangkan untuk Provinsi Kaltim capaiannya adalah 2,13. Dibandingkan dengan TFR Kabupaten Kutai Kartanegara lebih tinggi 0,04 di tingkat nasional, dan 0,03 lebih tinggi di tingkat Provinsi Kaltim.

4. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja DPPKB

Dilihat dari Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah maka dapat dilihat pada tahun 2025 dengan mengevaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 dengan sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah memiliki capaiannya 61,24 , dan tahun 2025 nilai saki 63,78 dapat dilihat dari table dibawah ini :

Tabel 3.9 Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Capaian Tahun 2024	TAHUN 2025		
				TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	61,24	85,55	63,78	75

5. Pencapaian Indikator Sasaran Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Menilai Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) telah disampaikan 100% dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.10 Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		
			TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut	100	100	100%

	dalam Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Perangkat Daerah	Hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)			
--	--	-------------------------------------	--	--	--

6. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar) dapat dilihat di tabel sebagai berikut :

Tabel 3.11. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		
			TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar)	100	100	100

7. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 Tahun terakhir terakhir telah ditindak lanjuti 100 % dapat dilihat di tabel sebagai berikut :

Tabel 3.12. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%
1	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	100	100	100%

8. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Tabel.3.13 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP Pada Perangkat Daerah	3	3,8	127,6

9. **Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah Dalam Pekan Inovasi Daerah**
Prestasi Inovasi Perangkat Daerah dapat dilihat di tabel sebagai berikut :

Tabel 3.14. Peningkatan Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	1	1	100%

Inovasi “Toko Kencana” yang diusung oleh DPPKB adalah Inisiatif Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) untuk mendekatkan pelayanan program Keluarga Berencana (KB) kepada Masyarakat. Program ini berfokus pada peningkatan kesadaran akan pentingnya kesehatan reproduksi dan layanan kontrasepsi di tingkat desa yang didukung oleh Bupati Kutai Kartanegara.

10. Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor

Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor dapat dilihat ditabel sebagai berikut :

Tabel 3.15. Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	%
1	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	100	86,6	86,6%

11. Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia

Tabel 3.15. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	%

Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	100	100	100%
--	---	-----	-----	------

12. Terlaksananya “Gerakan Etam Mengaji (GEMA)” di Perangkat Daerah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	%
Terlaksananya “Gerakan Etam Mengaji (GEMA)” di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan “Gerakan Etam Mengaji (GEMA)”	48	48	100%

13. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Nilai LPPD dapat dilihat di tabel sebagai berikut :

Tabel 3.17 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	3.7	3.26	88,02%

14. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Nilai SAKIP Pemerintah Daerah dapat dilihat di tabel sebagai berikut

Tabel 3.18. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	%
Meningkatkan Akuntabilitas	Nilai SAKIP Pemerintah	77	65,59	85,18

15. Meningkatnya Manajemen Birokrasi yang Efektif, Efisien, Inovatif, Akuntabel, Bersih dan Melayani

Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dapat dilihat di tabel sebagai berikut :

Tabel 3.19. Meningkatkan Manajemen Birokrasi yang Efektif, Efisien, Inovatif, Akuntabel, Bersih dan Melayani

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	%
Meningkatkan Manajemen Birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	65	71,51	110,02

16. Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah dapat dilihat di tabel sebagai berikut :

Tabel 3.20. Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	%
Meningkatkan Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Perentase Capaian IKK Perangkat Daerah	100	96,85	96,85%

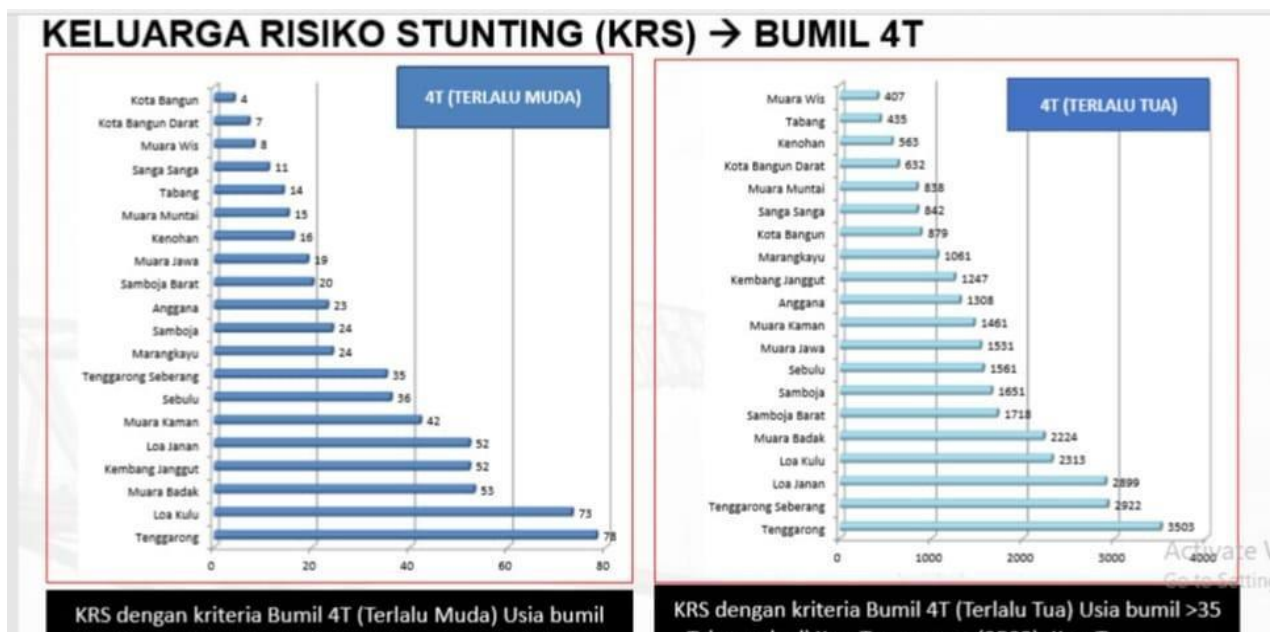
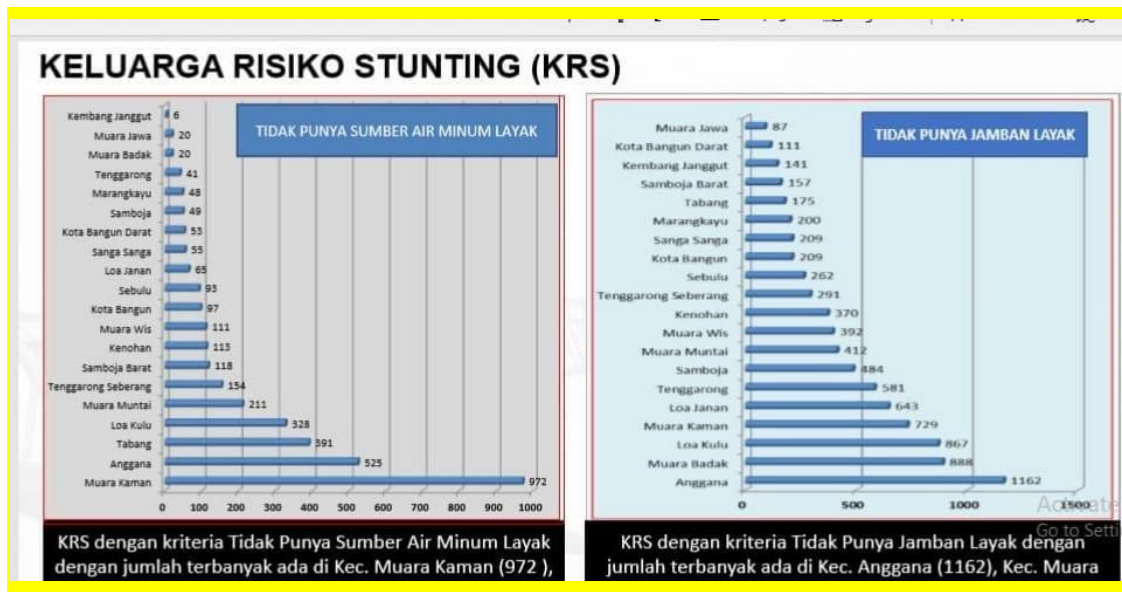
17. Menurunnya Prevalensi Stunting

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		
		TARGET	REALISASI	%
Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting	14,1	14,3	96,6%

Menurunnya Prevalensi Stunting, dari target 14,1 tercapai 14,3, dikarenakan masih relatif tingginya kasus BBLR (Berat Badan Lahir Rendah), Masih banyaknya ibu hamil dengan 4T (Terlalu Tua, Terlalu Muda, Terlalu Banyak dan Terlalu Dekat), Belum dipahaminya pengasuhan di 1000 HPK secara optimal oleh keluarga, Syndrome Orang Tua Bekerja, Cakupan ASI Eksklusif relatif masih rendah, serta

pemantauan pertumbuhan dan perkembangan belum dipahami sebagai suatu kebutuhan.

Gambar:1



KELUARGA RISIKO STUNTING (KRS) → BUMIL 4T



B. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (SDM, Dana dan Sarana dan Prasarana)

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara untuk tahun 2025 memiliki program dan indikator sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan
2. Program Pengendalian Penduduk
3. Program Pembinaan Keluarga Berencana
4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga

Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Program/Kegiatan	Nama Indikator	Pengampu	Satuan	Target	Capaian Fisik	Target Tercapai Pada Bulan	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA I	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	SEKRETARIS	Nilai	85,55	63,78 (Baik)	Juli	AKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mendapat nilai Baik (B) pada 1/3 Unit Kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja	Kurang tepatnya dokumen perencanaan yang disajikan sesuai dengan yang dikriteriakan saat dilakukan Review AKIP
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tim Kerja Perencanaan & Penyusunan Program	Dokumen	177	177	November	1. Komitmen aparaturnya pembina & pelaksana kegiatan, Komitmen dari Lintas sektor dan lintas bidang serta dukungan anggaran dan manajemen, 2. Meningkatnya sinkronisasi dan koordinasi antar Program dan Kegiatan terhadap Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara rutin dan berkesinambungan.	1. Banyaknya aplikasi perencanaan, penganggaran dan pelaporan sehingga diperlukan proses sinkronisasi dan validasi berulang agar data yang dihasilkan valid dan akurat. 2. Data pendukung yang beragam, target yang banyak dengan jumlah tenaga pelaksana dan waktu yang terbatas.
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Sub Penyusunan Program dan Keuangan	Laporan	12	12	Desember	1. Ketersediaan Regulasi dan Pedoman Teknis yang jelas dalam pengelolaan keuangan perangkat daerah	1. Banyaknya jenis laporan keuangan yang perlu diolah secara akurat 2. Perubahan regulasi yang sering dan mendadak

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Sub Bag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Dokumen	1	1	November	1. Ketersediaan sistem informasi BMD yang mendukung pencatatan dan pelaporan aset.	1. Kendala teknis dalam mengintegrasikan data barang milik daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Ka.SubBagian Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Dokumen	0	0	November	1. DPA Perubahan setelah efisiensi anggaran	1. Kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sub Bag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Layanan	42	34	November	1. Regulasi/Peraturan/Anggaran	1. Rasionalisasi Anggaran yang menghambat pelaksanaan kegiatan administrasi yang memerlukan anggaran penunjang
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	Sub Bag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Unit	23	23	November	1. Ketersediaan Anggaran	1. Perencanaan tidak terintegrasi, ketidaksesuaian antara perencanaan kebutuhan BMD dengan perencanaan anggaran (RKPD/APBD) menyebabkan pengadaan tertunda
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Sub Bag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Bulan	12	12	November	1. Tersedianya anggaran	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	Sub Bag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Unit	84	54	November	1. RKA/DPA	1. efisiensi anggaran tahap 3, yang mengurangi alokasi pembiayaan pemeliharaan

	Pemerintahan Daerah		Kepegawaian						
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK							2.	
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Tersedianya dokumen grand design kependudukan	Bidang Dalduk	Dokumen	1	1	November	Anggaran untuk pencapaian target tersedia	1. Kegiatan untuk penyusunan peta jalan perlu dukungan anggaran
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemetaan perkiraan pengendalian penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara	Bidang Dalduk	Persen	100	97,47	November	Anggaran untuk pencapaian target tersedia	1. Rasionalisasi anggaran sehingga merubah target 2. tidak dapat memaksimalkan waktu yang tersedia
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)							3.	
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Terlaksananya kegiatan advokasi dan KIE	Bidang KB	5,00 Event	5,00	100	November	Rasionalisasi Anggaran	1. Penentuan tanggal/waktu pelaksanaan dan faktor eksternal

	Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal								
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Terlaksananya kegiatan operasional KB di Lapangan	Bidang KB	237 Orang	237 Orang	100%	November	Tersedianya alokasi anggaran kegiatan dan SDM PKB/PLKB terampil dilapangan	1.Terkendala waktu dan peralatan penunjang SPJ kegiatan
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya alat, obat dan kontasepsi pada Fasilitas Kesehatan	Bidang KB	40,00 Fasilitas Kesehatan	40	100%	November	Kebijakan dan Ketersediaan alokon di kabupaten didistribusikan sesuai kebutuhan faskes	1. Alokasi ketersediaan alokon sangat tergantung dengan distribusi dari provinsi, stok alokon di aplikasi siga tidak sesuai dengan ketersediaan alokon di faskes sehingga alokon tidak bisa didistribusikan ke faskes tersebut.
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Cakupan ORMAS / POKJA	Bidang KB	75,00 Persen	76,3 Persen	100%	November	Adanya alokasi anggaran pasca RKA-P di tetapkan, sehingga beberapa Kegiatan IMP dapat terlaksana dan klaim pencairan kegiatan dapat diselesaikan.	1. Rasionalisasi Anggaran

	PROGRAM PEMBERDAYA AN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)							4.	
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan pembinaan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Bidang KK	100 Persen	97,37 Persen	97,37	November	Pelaksanaan Sub Kegiatan dan sebagian kegiatan sudah berjalan dengan pelaksanaan pengambilan data dilapangan	1. Keterlambatan pengumpulan SPJ di lapangan dan adanya proses rasionalisasi anggaran sehingga terjadi keterlambatan dalam proses serapan anggaran
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan pembinaan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Bidang KK	65 Persen	69,40 Persen	100 %	November	Pelaksanaan Sub Kegiatan dan sebagian kegiatan sudah berjalan dengan pelaksanaan pengambilan data dilapangan	1. Keterlambatan pengumpulan SPJ di lapangan dan adanya proses rasionalisasi anggaran sehingga terjadi keterlambatan dalam proses serapan anggaran

Berdasarkan pencapaian hasil kinerja per sasaran dan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100 % menunjukkan bahwa dana yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran mengalami efisiensi. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.55. Tingkat Efisiensi Sasaran Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN	INDIKATOR	% CAPAIAN KINERJA (INDIKATOR KINERJA YANG $\geq 100\%$)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatnya Peran Stakeholder dalam Program BANGGA KENCANA	Cakupan Stakeholder yang terlibat dalam Program BANGGA KENCANA	129%	78,44%	21,56%
2	Meningkatnya kesadaran ber-KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS)	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49 Tahun)	99, 07%	93,92%	6,1%
3	Meningkatnya Nilai Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	116,43	88,98%	11,02%
4	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP DPPKB	74,6	81,94%	18,06%

Dari tabel diatas dapat dilihat untuk tingkat efisiensi sasaran indikator kinerja utama pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya Peran Stakeholder yang Terlibat Dalam Program BANGGA KENCANA.

Cakupan Stakeholder Yang Terlibat Dalam Program BANGGA KENCANA adalah Persentase dari total Stakeholder yang diidentifikasi terlibat dalam Program BANGGA KENCANA meliputi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Lembaga, Mitra Kerja, instansi terkait di tingkat Desa/Kelurahan. Terdapat 32 Organisasi Perangkat Daerah yang terikat dalam pemanfaatan data Bangga Kencana yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Data dari 55 Jumlah Stakeholder yang terlibat dalam Program BANGGA KENCANA. Capaian Kinerja meningkat dari Target capaian 45 menjadi **58,18** atau tercapai 129%.

$$\begin{aligned}\text{Rumus: } &= \frac{(\text{Jumlah Total stakeholder yang aktif terlibat})}{(\text{Jumlah Total stakeholder yang ditargetkan})} \times 100\% \\ &= 32/55 \times 100 \\ &= 58,18\end{aligned}$$

Serapan anggaran untuk pencapaian sasaran dan indikator tersebut yaitu 78,44% dengan efisiensi anggaran sebesar 21,56%.

2. Sasaran Meningkatnya Kesadaran ber-KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS).

Indikator Absolut Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49 Tahun) adalah jumlah anak rata-rata yang dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. Angka TFR di peroleh dengan menghitung banyaknya kelahiran dari perempuan umur 15-49 tahun selama periode tertentu dibagi jumlah perempuan umur 15-49 tahun pada periode yang sama. Fertilitas di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami penurunan menjadi **2,16** dari angka 2,24 pada tahun 2024, Kondisi ini menunjukkan bahwa program penurunan angka kelahiran total/Total Fertility Rate (TFR) di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan Capaian dari Target 2,14, adalah sebesar 99,07% dari target. Sedangkan untuk serapan anggaran adalah 93,92% dengan efisiensi sebesar 6,1%.

3. Sasaran Meningkatnya Kualitas Keluarga

iBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui pengukuran dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga yang menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. Di tahun 2025 capaian iBangga Kutai Kartanegara pada angka **73,5** (Nilai Mutu) dari target capaian 63 (Nilai Mutu), atau persentase capaian 116,43%. Angka tersebut diperoleh melalui survey dan pendataan keluarga dengan mengukur 3 dimensi utama yang mencakup 11 indikator dan 17 variabel yang kemudian di skor dan di rata-rata menjadi nilai iBangga. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2024) nilai iBangga Kutai Kartanegara yaitu pada angka 67,0 maka dapat disampaikan bahwa terjadi peningkatan kualitas keluarga. Untuk serapan anggaran terserap 88,98% dengan efisiensi sebesar 11,02%

4. Sasaran Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan dokumen tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah yang secara sistematis dan terukur membandingkan perencanaan strategis dengan capaian hasil secara actual, serta memuat analisis efisiensi penggunaan anggaran.

Dari hasil Reviu Mandiri AKIP tahun 2025 diperoleh Nilai SAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada angka 63,78 atau 74,6% Capaian Kinerjanya, Serapan Anggaran 81,94% dengan efisiensi sebesar 18,06%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	INDIKTOR	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN			
				TARGET	CAPAIAN	PERSENT ASI	PAGU PERUBAHAN	TOTAL REALISASI	SISA DANA	PERSEN TASI
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						23.898.894.081	20.463.338.194,00	3.435.555.887,00	85,62
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	85,55	63,78	74,6	11.088.261.612	9.085.929.265,00	2.002.332.347,00	89.84
B	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan Stakeholder yang Terlibat Dalam Program BANGGA KENCANA	Persen	45	58,18	129	2.668.025.380,00	2.092.865.693,00	575.159.687,00	78,44
C	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15- 49 Tahun)	Angka	2,14	2,16	93,92	5.254.307.189,00	4.934.905.341,00	575.159.687,00	93,92
D	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	63	73,35	116,43	4.888.299.000,00	4.349.637.895,00	538.661.105,00	88,98

Tabel 3.25 Uraian Target dan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKTOR	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN				
				TARGET	CAPAIAN	%	PAGU PERUBAHAN	TOTAL REALISASI	SISA DANA	%	TINGKAT EFISIENSI
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						23.898.894.081	20.463.338.194	3.435.555.887	85,62	18,06%
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	85,55	63,78	74,6	11.088.261.612	9.085.929.265	2.002.332.347	89,84%	10,16%
		Tindak Lanjut Temuan LHP BPK/Inspektorat	Persen	100%	100%	100%			0		
		Persentase identifikasi, inventarisasi aset dalam penelusuran	Persen	100%	100%	100%			0		
		Persentase input Rencana Umum Pengadaan (RUP)	Persen	100%	100%	100%			0		
		Tingkat Kepatuhan LHKPN	Persen	100%	100%	100%			0		
		Tingkat Kepatuhan LHKASN/SPT Tahunan PPH	Persen	100%	100%	100%			0		
		Predikat Tata Kelola Arsip	Predikat	100	91,44	91,44			0		

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKTOR	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN				
				TARGET	CAPAIAN	%	PAGU PERUBAHAN	TOTAL REALISASI	SISA DANA	%	TINGKAT EFISIENSI
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	177	177	100	970.673.940,00	823.337.987,00	147.335.953	84,82%	15,18%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	100	638.689.740,00	601.956.487,00	36.733.253	94,25%	5,75%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	12	100	24.368.000,00	17.068.000,00	7.300.000	70,06%	29,94%
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12	12	100	86.112.400,00	51.271.000,00	34.841.400	59,54%	40,46%
4	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	1	1	100	195.359.000,00	129.763.900,00	65.595.100	66,42%	33,58%
5	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	1	1	100	10.742.000,00	10.742.000,00	0	100%	0,00%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKTOR	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN				
				TARGET	CAPAIAN	%	PAGU PERUBAHAN	TOTAL REALISASI	SISA DANA	%	TINGKAT EFISIENSI
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	1	100	15.410.000,00	12.536.600,00	2.873.400	81,35%	18,65%
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	12	12	100	7.799.272.964,00	6.711.366.639,00	1.087.906.325	86,11%	13,89%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Orang/Bln	770	710	100	7.571.908.964,00	6.519.864.079,00	1.052.044.885	86,11%	13,89%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	1	1	100	16.504.000,00	11.980.000,00	4.524.000	72,59%	27,41%
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan	12	12	100	196.372.000,00	168.392.560,00	27.979.440	85,75%	14,25%
4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	100	14.488.000,00	11.130.000,00	3.358.000	76,82%	23,18%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKTOR	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN				
				TARGET	CAPAIAN	%	PAGU PERUBAHAN	TOTAL REALISASI	SISA DANA	%	TINGKAT EFISIENSI
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	100	215.000.000,00	194.126.000,00	20.874.000,00	90,23%	9,77%
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	100	215.000.000	194.126.000	20.874.000	90,23%	9,77%
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	0	0	0	296.373.000,00	0	296.373.000	0,00%	100%0
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	0	0	0	296.373.000,00	0	296.373.000	0,00%	100%
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	42	34	75	478.033.200,00	367.915.967,00	110.117.233	76,96%	23,04%
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	3	3	100	150.000.000,00	97.322.250,00	52.677.750	64,88%	35,12%
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	4	4	100	80.000.000,00	70.255.680,00	9.744.320,00	87,82%	12,18%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKTOR	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN				
				TARGET	CAPAIAN	%	PAGU PERUBAHAN	TOTAL REALISASI	SISA DANA	%	TINGKAT EFISIENSI
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	2	2	100	19.999.800,00	19.995.200,00	4.600	99,98%	0,02%
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	30	100	103.033.400,00	97.646.237,00	5.387.1630	94,77%	5,23%
5	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	100	125.000.000,00	82.696.600,00	42.303.400	66,16%	33,84%
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	34	34	100	172.582.000,00	111.754.350,00	60.827.650	64,75%	35,25%
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	15	15	100	37.582.000,00	35.818.350,00	1.763.650	95,31%	4,69%
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	19	19	100	135.000.000,00	75.936.000,00	59.064.000	56,25%	43,75%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKTOR	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN				
				TARGET	CAPAIAN	%	PAGU PERUBAHAN	TOTAL REALISASI	SISA DANA	%	TINGKAT EFISIENSI
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	100	1.123.296.508,00	866.429.112,00	256.867.396	77,13%	22,87%
1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	12	100	414.888.200,00	273.293.862,00	141.594.3380	65,87%	34,13%
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	12	12	100	75.000.000,00	57.480.000,00	17.520.000	76,64%	23,36%
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	12	100	633.408.308,00	535.655.250,00	97.753.058	84,57%	15,43%
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang dipelihara	Unit	95	95	100	33.030.000,00	10.999.210,00	22.030.790	33,30%	66,70%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	11	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	84	54	64,29%	33.030.000,00	10.992.210,00	22.037.7900	33,30%	66,70%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKTOR	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN				
				TARGET	CAPAIAN	%	PAGU PERUBAHAN	TOTAL REALISASI	SISA DANA	%	TINGKAT EFISIENSI
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasaran Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi.	Unit	1	0	0	0	0	0	0,00 %	0,00%
B	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	CAKUPAN STAKEHOLDER YANG TERLIBAT DALAM PROGRAM BANGGA KENCANA	Persen	45	58,2		2.668.025.380,00	2.092.865.693,00	575.159.6870	78,44%	21,56%
I	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian Kuantitas Penduduk	Tersedianya dokumen grand design kependudukan	Dokumen	1	1	100%	148.077.680,00	131.860.750,00	16.216.930	89,05%	10,95%
1	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Dokumen	365	356	97,50%	41.790.000,00	39.484.800,00	2.305.200	94,48%	5,52%
2	Penguatan Kerjasama Pelaksanan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan	Dokumen	1	1	100%	33.575.600,00	28.715.550,00	4.860.050	85,53%	14,47%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKTOR	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN				
				TARGET	CAPAIAN	%	PAGU PERUBAHAN	TOTAL REALISASI	SISA DANA	%	TINGKAT EFISIENSI
3	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten /Kota Terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten /Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Dokumen	1	1	100%	55.445.400,00	54.810.400,00	635.000	98,85%	1,15%
4	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program BANGGA KENCANA	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program BANGGA KENCANA	Dokumen	1	1	100%	17.266.680,00	8.850.000,00	8.416.680	51,25%	48,75%
II	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	Tercapainya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Di Kabupaten Kutai Kartanegara	75 Persen				2.519.947.700,00	1.961.004.943,00	558.942.757	77,82%	22,18%
1	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Dokumen	1	1	100%	25.687.000,00	19.226.000,00	6.461.000	74,85%	25,15%
2	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (SIGA)	Laporan	1	1	100%	61.270.000,00	46.100.000,00	15.170.000	75,24%	24,76%
3	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang tersedia	Dokumen	1	1	100%	69.456.300,00	51.585.100,00	17.871.200	74,27%	25,73%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKTOR	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN				
				TARGET	CAPAIAN	%	PAGU PERUBAHAN	TOTAL REALISASI	SISA DANA	%	TINGKAT EFISIENSI
4	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Dokumen Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	1	1	100%	415.504.600,00	359.595.284,00	55.909.316	86,54%	13,46%
5	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	20	20	100%	200.490.000,00	200.490.000,00	0	0,00%	100%
6	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program BANGGA KENCANA	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program BANGGA KENCANA	Laporan	237	195	82,30%	1.683.282.000,00	1.234.014.559,00	449.267.441	73,31%	26,69%
7	Penyusunan Profil Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA)	Jumlah Dokumen Profil Program Pembangunan dan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA)	Dokumen	1	1	100%	64.257.800,00	49.994.000,00	14.263.800	77,80%	22,20%
C	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49 Tahun)	Angka Absolut	2,14	2,16	99,07	5.254.307.189,00	4.934.905.341,00	319.401.848	93,92%	6,08%
		Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi Cara Modern (mCPR)	Persen	77,2	71,7	92,9			0		
		Meningkatnya Angka Peserta KB Baru	Persen	15,2	15,98	105,13			0		
		Menurunnya Angka Unmet Need	Persen	10,5	7,9	132,9			0		

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKTOR	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN				
				TARGET	CAPAIAN	%	PAGU PERUBAHAN	TOTAL REALISASI	SISA DANA	%	TINGKAT EFISIENSI
		Meningkatnya Angka Akseptor MKJP	Persen	16,13	23,8	147,56			0		
		Menurunnya Angka Drop Out Akseptor	Persen	12,02	22,98	52,30			0		
I	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya kegiatan advokasi dan KIE	Event	5	5	100	2.675.254.429,00	2.500.648.241,00	174.606.188	93,47%	6,53%
1	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	1	1	100	341.946.000,00	338.680.800,00	3.265.200	99,05%	0,95%
2	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	1	1	100	332.754.000,00	250.863.700,00	81.890.300	75,39%	24,61%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKTOR	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN				
				TARGET	CAPAIAN	%	PAGU PERUBAHAN	TOTAL REALISASI	SISA DANA	%	TINGKAT EFISIENSI
3	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	6	6	100	109.222.129,00	102.986.026,00	6.236.103	94,29%	5,71%
4	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	21	21	100	1.746.427.800,00	1.702.650.965,00	43.776.835	97,49%	2,51%
5	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	2	2	100	144.904.500,00	105.466.750,00	39.437.7500	72,78%	27,22%
II	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Terlaksananya kegiatan operasional KB di Lapangan	Desa	237	237	100	656.580.000,00	656.305.000,00	275.000	99,96%	0,04%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKTOR	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN				
				TARGET	CAPAIAN	%	PAGU PERUBAHAN	TOTAL REALISASI	SISA DANA	%	TINGKAT EFISIENSI
1	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Unit	12	0	0	0	0	0	0,00 %	0,00%
2	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	237	237	100	656.580.000,00	656.305.000,00	275.000	99,96 %	0,04%
3	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan Oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembanguna Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Organisasi	1	0	0	0	0	0	0,00 %	0,00%
4	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas KB/Penyuluh Lapangan KB (PKB/PLKB)	Laporan	6	0	0	0	0	0	0,00 %	0,00%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKTOR	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN				
				TARGET	CAPAIAN	%	PAGU PERUBAHAN	TOTAL REALISASI	SISA DANA	%	TINGKAT EFISIENSI
III	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten /Kota	Tersedianya alat, obat dan kontasepsi pada Fasilitas Kesehatan	Faskes	40	40	100%	1.133.188.160,00	1.122.427.190,00	10.760.970	99,05%	0,95%
1	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	2.689	2905	108,03%	942.884.000,00	936.478.790,00	6.405.210	99,32%	0,68%
2	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	3	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	2	2	100	72.188.000,00	68.894.300,00	3.293.700	95,44%	4,56%
4	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan	6	6	100	118.116.160,00	117.054.100,00	1.062.0600	99,10%	0,90%
5	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Kab/Kota	12	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKTOR	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN				
				TARGET	CAPAIAN	%	PAGU PERUBAHAN	TOTAL REALISASI	SISA DANA	%	TINGKAT EFISIENSI
IV	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Cakupan ORMAS / POKJA	Persen	75			789.284.600,00	655.524.910,00	133.759.690	83,05%	16,95%
1	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	9	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	100	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Laporan	2	1	57%	58.880.800,00	32.344.000,00	26.536.800	54,93%	45,07%
4	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Unit	125	90	72%	480.373.800,00	378.367.610,00	102.006.190	78,77%	21,23%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKTOR	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN				
				TARGET	CAPAIAN	%	PAGU PERUBAHAN	TOTAL REALISASI	SISA DANA	%	TINGKAT EFISIENSI
5	Pelaksanaan dan Pengelo laan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Kelu - arga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pem bangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kampung	44	44	100%	250.030.000,00	244.813.300,00	5.216.700	97,91%	2,09%
D	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	1). Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB	Persen	71,31%	96,52	135,35	4.888.299.000,00	4.349.637.895,00	538.661.105	88,98%	11,02%
		2). Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB	Persen	84,98%	85,82	100,99			0		
		3). Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber- KB	Persen	61,32%	77,28	126,01			0		
		4). Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Unit	7	1	14,29			0		
		5). Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	Persen	88,89%	100,67	113,25			0		

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKTOR	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN				
				TARGET	CAPAIAN	%	PAGU PERUBAHAN	TOTAL REALISASI	SISA DANA	%	TINGKAT EFISIENSI
		6). Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri	Persen	70,26%	75,99	108,16			0		
I	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Pembinaan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persen	100	88,98	88,98	1.663.278.200,00	1.235.206.395,00	428.071.805	74,26%	25,74%
1	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA	Laporan	5	5	100%	127.214.700,00	79.610.000,00	47.604.700	62,58%	37,42%
2	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Laporan	2	2	100%	726.750.000,00	677.080.000,00	49.670.000	93,17%	6,83%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKTOR	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN				
				TARGET	CAPAIAN	%	PAGU PERUBAHAN	TOTAL REALISASI	SISA DANA	%	TINGKAT EFISIENSI
3	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Unit	20	20	100%	165.701.100,00	149.524.395,00	16.176.705	90,24%	9,76%
4	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Orang	120	0	0%	132.082.400,00	0	132.082.400	0,00%	100%
5	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Kelompok	76	65	85,53%	355.656.100,00	223.810.000,00	131.846.100,00	62,93%	37,07% 37,07%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKTOR	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN				
				TARGET	CAPAIAN	%	PAGU PERUBAHAN	TOTAL REALISASI	SISA DANA	%	TINGKAT EFISIENSI
6	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor(UPPKA)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Kelompok	30	30	100%	155.873.900,00	105.182.000,00	50.691.900	67,48%	32,52%
II	Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten / kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Terlaksananya dan Terpenuhinya Peran Serta ORMAS dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persen	60	60	100%	3.225.021.700,00	3.114.431.500,00	110.590.200	96,57%	3,43%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKTOR	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN				
				TARGET	CAPAIAN	%	PAGU PERUBAHAN	TOTAL REALISASI	SISA DANA	%	TINGKAT EFISIENSI
1	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyaraktan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyaraktan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	1	1	100%	81.125.100,00	38.489.000,00	42.636.100	47,44%	52,56%
2	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kelompok	68	34	100%	117.211.600,00	55.902.500,00	61.309.100	47,69%	52,31%
3	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Laporan	3	0	0%	0	0	0	0,00%	0

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKTOR	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN				
				TARGET	CAPAIAN	%	PAGU PERUBAHAN	TOTAL REALISASI	SISA DANA	%	TINGKAT EFISIENSI
4	PemantauanData dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja CalonPengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, PascaSalin/Kelahiran, Baduta/Balita	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin /Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Laporan	1	1	100%	1.446.855.000,00	1.443.510.000,00	3.345.000	99,77%	0,23%
5	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, PascaSalin/Kelahiran, Baduta /Balita	Jumlah Laporan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pascasalin/kelahiran, Baduta/Balita)	Laporan	1	1	100%	1.579.830.000,00	1.576.530.000,00	3.300.000	99,70%	0,30%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Program yang mendukung sasaran Renstra Dinas PPKB Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Cakupan Stakeholder Yang Terlibat Dalam Program BANGGA KENCANA. Persentase dari total Stakeholder yang diidentifikasi terlibat dalam Program BANGGA KENCANA meliputi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Lembaga, Mitra Kerja, instansi terkait di tingkat Desa/Kelurahan. Terdapat 32 Organisasi Perangkat Daerah yang terikat dalam Berita Acara Serah Terima Data dari 55 Jumlah Stakeholder yang terlibat dalam Program BANGGA KENCANA. Capaian Kinerja meningkat dari Target capaian 45 menjadi 58,18 atau tercapai 129%.

$$\begin{aligned}\text{Rumus:} &= \frac{(\text{Jumlah Total stakeholder yang aktif terlibat})}{(\text{Jumlah Total stakeholder yang ditargetkan})} \times 100 \\ &= \frac{32}{55} \times 100 \\ &= 58,18\end{aligned}$$

2. Angka Pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/m-CPR) bagi perempuan menikah usia 15-49 Tahun. mCPR digunakan untuk mengukur proporsi perempuan yang menggunakan kontrasepsi modern. Kontrasepsi modern digunakan untuk mengatur jarak kelahiran, membatasi jumlah kelahiran, atau menunda kelahiran. Metode Kontrasepsi Modern termasuk Pil, IUD, Kondom, Implant, Suntikan Kontraseptif, Sterilisasi, dan MAL. Menurunnya Pemakaian Kontrasepsi (CPR) cara Modern dari target capaian tahun 2025 sebesar 77,22 namun pemakaian tersebut hanya terealisasi 70,00% belum mencapai target tapi meningkat dari angka capaian tahun sebelumnya (2024) sebesar 70,00 %

$$\begin{aligned}\text{Rumus:} &= \frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif Modern}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100 \\ &= \frac{77096}{110131} \times 100 \\ &= 70,00\%\end{aligned}$$

3. Meningkatnya Angka Peserta KB Baru sebesar 15,98% dari target 15,20%, hal ini disebabkan adanya peningkatan pelayanan KB Bergerak, peningkatan kapasitas kader di

lapangan.

4. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terpenuhi (Unmet need). Unmet need adalah proporsi pasangan usia subur (PUS) dalam status kawin yang tidak menggunakan alat kontrasepsi meskipun mereka menyatakan ingin menunda atau menjarangkan anak. Di tahun 2025 terjadi penurunan Angka Unmet Need menjadi 4,98 Persen dari target 10,50 Persen, yang berarti jumlah yang tidak menggunakan alat kontrasepsi dari keinginan yang tidak terpenuhi menurun sebesar 211% dikarenakan pemahaman masyarakat/PUS tentang kesadaran untuk ber-KB dengan optimalisasi dari PKB/PLKB memberikan KIE tentang pentingnya Ber-KB.

Rumus: = Jumlah PUS yang ingin Ber-KB tetapi tidak terlayani/Jumlah Pasangan Usia Subur X 100

$$= 5486/110131 \times 100$$

$$= 4,98 \%$$

5. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). MKJP adalah Persentase dari total perempuan usia subur (PUS) yang saat ini menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang. MKJP termasuk alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR/IUD), implant, dan sterilisasi baik laki-laki maupun perempuan. Di tahun 2025 terjadi peningkatan Angka Akseptor MKJP dari target 16,13%, tercapai 19,74%, hal ini disebabkan meningkatnya KIE, pelayanan KB Bergerak oleh Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP).
6. Meningkatnya Angka Drop Out Akseptor sebesar 22,98% dari target 12,02%, hal ini disebabkan karena adanya keinginan untuk hamil lagi, efek samping dan ketidaknyamanan dalam menggunakan alat kontrasepsi dan kurangnya pemahaman tentang jenis kontrasepsi dan cara mengatasinya.

Dari indikator Tujuan/Sasaran didapat pula :

1. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB adalah upaya pembinaan oleh para kader BKB terhadap anggotanya, khususnya yang masih PUS untuk menjaga kelangsungan ber-KB melalui pembinaan kelompok. Kelompok BKB pada hakekatnya merupakan wadah pembinaan kelangsungan ber-KB bagi para keluarga Balita anggota BKB, khususnya yang masih PUS, baik untuk mengatur jarak kelahiran maupun untuk membatasi jumlah anak yang sudah dimilikinya.

Rumus : = **(Jumlah anggota BKB yang ber KB) /12 ×100**

$$\text{Cakupan Anggota BKB ber KB} = \frac{\text{Anggota BKB ber KB}}{12} \times 100$$

$$\text{Cakupan Anggota BKB ber KB} = 11.582 / 12 \times 100\% = 96,52\%$$

b). Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber KB adalah Persentase anggota kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) yang menggunakan metode kontrasepsi keluarga berencana;

$$\text{Rumus:} = (\text{Jumlah anggota BKR yang menggunakan KB}) / 12 \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Cakupan Anggota BKR ber KB} &= \frac{\text{Anggota BKR ber KB}}{12} \times 100 \\ &= 10.298 / 12 \times 100 = 85,82\% \end{aligned}$$

c). Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber KB adalah Persentase Anggota Kelompok Bina Lansia (BKL) yang menggunakan atau pernah menggunakan metode kontrasepsi keluarga berencana. Biasanya ini mengacu pada individu atau pasangan lansia yang masih aktif seksual dan memilih untuk menggunakan metode KB untuk mengatur kehidupan reproduksinya. Capaian ini mengalami penurunan, karena adanya beberapa faktor penghambat antara lain: Menurunnya kesehatan fisik Lansia, sehingga partisipasi dalam kelompok sering terganggu, kurangnya Fasilitas dan Pendanaan Operasional kegiatan BKL di tingkat desa/kecamatan dan kurangnya dukungan atau kesadaran anggota keluarga yang memiliki lansia.

$$\text{Rumus:} = \text{Anggota BKL ber - KB} / 12 \times 100$$

$$= 9273 / 12 \times 100 = 77,28\%$$

d). Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan. Untuk saat ini baru ada 1 (satu) PPKS yang terdapat di Kecamatan Tenggarong. Tidak ada penambahan PPKS karena Kurangnya Tenaga Lapangan/ Pendamping sehingga membuat jangkauan pelayanan sosial tidak merata.

e). Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa. Persentase remaja dan mahasiswa yang terdaftar atau aktif mengikuti program dan kegiatan di Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa. PIK-R/M adalah fasilitas yang menyediakan informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi, seksualitas, dan isu-isu terkait lainnya kepada remaja dan mahasiswa, dimana capaiannya meningkat sejalan dengan optimalnya peran GenRe (Generasi Berencana) untuk merencanakan kehidupannya lebih baik.

$$\text{Rumus} = (\text{Jumlah remaja/mahasiswa terdaftar di PIK-R/M}) / 12 \times 100\%$$

$$= 12080 / 12 \times 100 = 100,67\%$$

f). Cakupan PUS peserta KB anggota usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang Ber-KB Mandiri. Persentase Perempuan Usia Subur (PUS) yang merupakan peserta KB dan anggota dari Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang menggunakan kontrasepsi secara mandiri, tanpa bantuan subsidi atau program pemerintah. Pada hakekatnya merupakan wadah pembinaan KPS dan KS 1 untuk memenuhi kebutuhan akses informasi dan pembinaan usaha ekonomi produktif bagi anggota kelompok dan pembinaan kelangsungan ber-KB. Capaian ini mengalami peningkatan karena adanya faktor peran aktif pengelola dan pendamping (PLKB) yang melakukan pembinaan intensif, sinergi antara pemberdayaan ekonomi dan meningkatnya kesadaran akan kesehatan reproduksinya.

Rumus : = **(Jumlah PUS anggota UPPKA yang menggunakan KB mandiri) / 12 x100%**

$$9119 / 12 \times 100 = 75,99\%$$

C. REALISASI ANGGARAN

Secara keseluruhan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2025 dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

No	Uraian Anggaran	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran 2025	Persentase
1	Belanja Pegawai	7.609.708.964	6.557.364.079	86,17
2	Belanja Barang & Jasa	16.063.727.117	13.790.197.765	85,84
3	Belanja Bantuan Sosial	18.900.000	14.400.000	76,19
4	Belanja Modal	206.558.000	101.376.350	49,07
	Jumlah	23.898.894.081	20.463.338.194	85,62

Adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan sebagai berikut :

Program Pengendalian Penduduk dengan kegiatan

1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk dengan alokasi dana sebesar Rp. 148.077.680,00 yang dipergunakan

untuk implementasi Pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan informal serta jalur informal di kegiatan kelompok kegiatan masyarakat binaan yaitu pemberian informasi sekaligus sarpras agar masyarakat luas lebih paham akan kependudukan, dan pelaksanaan sarasehan hasil pemutakhiran data, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 131.860.750,00 atau 89,05%

2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 2,519.947.700,00 yang dipergunakan untuk Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga, Penyediaan Data dan Informasi Keluarga, Pencatatan dan Pengumpulan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB, Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana dan Penyusunan Profil Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangsa Kencana) adapun realisasi anggaran keuangan sebesar Rp. 1.961.004.943,00 atau 77,82 %

3. Program Pembinaan Keluarga Berencana, dengan kegiatan :

- a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.675.254.429,00 dipergunakan untuk Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana, Advokasi Program KKBPK kepada stakeholders dan Mitra Kerja, Promosi dan KIE Program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang, Pelaksanaan mekanisme operasional program KKBK melalui rapat koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) serta Pengendalian program KKBK . Adapun realisasi keuangan sebesar Rp2.675.254.429,00 atau 93,47% .
- b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), dengan alokasi dana sebesar Rp. 656.580.000,00 yang dipergunakan untuk Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP). Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 656.580.000,00 atau 99,96%
- c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.133.188.160,00 yang dipergunakan untuk Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang

(MKJP), Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaaringan dan Jejaringnya, Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 1.122.427.190,00 atau 99,05 %.

- d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 789.284.600,00 adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 655.524.910,00 atau 83,05 % yang digunakan untuk Pembinaan Terpadu Kampung KB, Fasilitas Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas dan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas.

4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), dengan kegiatan :

- a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang digunakan untuk Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga), Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)), Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), dan Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dengan pagu anggaran sebesar 1.663.278.200,00 dan terealisasi sebesar 1.235.206.395,00 atau 74,26 %.
- b. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan

Tingkat Daerah Kabupaten/kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan alokasi sebesar Rp. 3.225.021.700,00 dan dibelanjakan untuk Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dan Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS), Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS),

- c. Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita) dan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita terealisasi sebesar Rp 3.114.431.500,00 atau 96,57 %.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara garis besar pelaksanaan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan *Time Schedule* dan hasil (*outcome*) yang diharapkan. Seluruh penggunaan dana dari APBD Tahun 2025, baik kegiatan bersifat rutin maupun pembangunan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran yakni efektif dan efisien.

Kinerja Keberhasilan kinerja tersebut dikarenakan ada dukungan dana dari APBD, dan didukung SDM Aparatur serta kesadaran masyarakat yang cukup tinggi untuk berperan serta aktif dalam program-program perencanaan dalam urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara.

Namun demikian berdasarkan kajian evaluasi kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara yang dituangkan dalam LKjIP Tahun 2025 ini, masih terdapat beberapa kendala/ permasalahan antara lain:

- Rendahnya capaian Metode Kontasepsi Jangka Panjang apabila dibandingkan dengan jumlah peserta KB aktif
- Rendahnya keaktifan keluarga dalam mengikuti pertemuan BKB, BKR, BKL
- Tidak seimbangnya jumlah PKB di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan wilayah binaan;
- Terbatasnya sarana BKB Kit, BKL Kit, dan Kit Siap Nikah di Desa Lokus Stunting;
- Masih kurangnya sosialisasi dan penyebaran informasi tentang kependudukan dan pentingnya pengendalian penduduk.

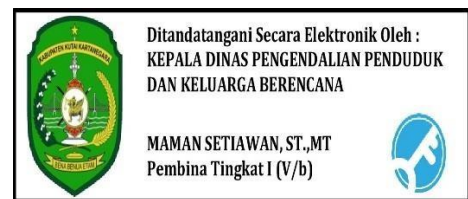
4.2 Saran

Untuk peningkatan kinerja di tahun-tahun yang akan datang agar lebih berhasil lagi kiranya perlu dukungan penuh dari Pemerintah Daerah baik dari aspek personal, sarana dan prasarana serta dana dan peran yang lebih pro aktif dari pelaksana. Secara operasional dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sinkronisasi dan Koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait dalam rangka pemantapan dan keterpaduan program.
2. Meningkatkan sarana Advokasi kepada pihak terkait (formal maupun informal, tokoh masyarakat, agama dan pihak-pihak lain) dalam rangka meningkatkan dukungan terhadap program.

3. Memaksimalkan peran Kader PPKBD dan Sub PPKBD di lapangan yang memberikan informasi dan bantuan melalui pendidikan dan kegunaan alat kontrasepsi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 yang dapat kami sampaikan, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya.



LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja

 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : DAFIP HARYANTO, S.Sos., M.Si. Jabatan : Plt. KEPALA DINAS Selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama : dr. AULIA BASRIE, M.Kes Jabatan : BUPATI KUTAI KARTANEGARA Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Pertama berjanji: 1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin. 2. Terwujudnya pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi. 3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik; 4. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;

5. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;
6. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
7. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
9. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
10. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
11. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan stunting
12. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;

14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 07 November 2025

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA



dr. AULIA RAHMAN BASRI, M.Kes

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA DINAS



DAFIP HARYANTO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP: 197009241990031001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya peran stakeholder dalam Program KKBPK	Cakupan stakeholder yang terlibat dalam program KKBPK	Persen	45
2.	Menurunnya angka kelahiran total / Total Fertility Rate (TFR) per WUS (15-49) tahun	Menurunnya Angka TFR per WUS (15-49 tahun)	Persen	2,14
3.	Meningkatnya pemberdayaan keluarga	Indek Pembangunan Keluarga	Nilai	63
4.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja DPPKB	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	85,55
5.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
6.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30 (Baik)
7.	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100

8.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3
9.	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1
10.	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
11.	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100
12.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
13.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (Tinggi)
14.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77
15.	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65
16.	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100
17.	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting	Persen	14,1

**PROGRAM DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.11.088.261.612	APBD
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rp.2.668.025.380	APBD
3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rp.5.254.307.189	APBD
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rp.4.888.299.900	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp.23.898.894.081	

Kutai Kartanegara, 07 November 2025

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA



dr. AULIA BASRIE, M.Kes

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA DINAS



DAFIP HARYANTO, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda(IV/c)

NIP: 197009241990031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DAFIP HARYANTO, S.Sos., M.Si.

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Jabatan : BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin.
2. Terwujudnya pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;

5. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;
6. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
7. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
9. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
10. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
11. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan stunting
12. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;

14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

BUPATI KUTAI KARTANEGARA


Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Pihak Pertama,

Plt. KEPALA DINAS


DAFIP HARYANTO, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda(IV/c)

NIP: 197009241990031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya peran stakeholder dalam Program KKBPK	Cakupan stakeholder yang terlibat dalam program KKBPK	Persen	45
2.	Menurunnya angka kelahiran total / Total Fertility Rate (TFR) per WUS (15-49) tahun	Menurunnya Angka TFR per WUS (15-49 tahun)	Persen	2,14
3.	Meningkatnya pemberdayaan keluarga	Indek Pembangunan Keluarga	Nilai	63
4.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja DPPKB	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	85,55
5.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
6.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30 (Baik)
7.	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100

8.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3
9.	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1
10.	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
11.	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100
12.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
13.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (Tinggi)
14.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77
15.	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65
16.	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100
17.	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting	Persen	14,1

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.14.144.206.101	APBD
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rp.6.426.495.000	APBD
3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rp.7.152.260.000	APBD
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rp.6.201.850.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp.33.924.811.101	

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA DINAS

DAFIP HARYANTO, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP: 197009241990031001

2. Indikator Kinerja utama (IKU)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2025

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Formulasi Cara Perhitungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	85,55	<i>Integrasi dari dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja</i>
2.	Meningkatnya Kesadaran Ber-KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS)	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49 tahun)	Absolut	2,14	$TFR = 5 \sum ASFR_i$
3.	Meningkatnya Peran Stakeholder dalam program BANGGA KENCANA	Cakupan Stakeholder yang terlibat dalam Program BANGGA KENCANA	Persen	45,00	$= \frac{(\text{Jumlah Total Stakeholder Yang Aktif Terlibat}) / (\text{Jumlah Total Stakeholder Yang Ditargetkan}) \times 100\%}{}$
4.	Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	Nilai Mutu	63,00	$i\text{Bangga} = 1/3 (\text{Indeks Ketentraman} + \text{Indeks Kemandirian} + \text{Indeks Kebahagiaan}) \times 100$

PENJELASAN :

1). Indikator ke 1 *Nilai Sakip* diperoleh dengan mengintegrasikan Bobot dan penilaian Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

2). *TFR (Total Fertility Rate)* adalah Jumlah Anak yang rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya. TFR dihitung dengan menjumlahkan nilai semua ASFR dikalikan 5 dibagi 1.000..

- *ASFR (Age Specific Fertility Rate)* adalah Angka Kelahiran menurut umur tertentu per 1.000 perempuan pada kelompok umur yang sama.
- *i* adalah Kelompok Umur Lima Tahunan.

3). Indikator ke 3, *Cakupan Stakeholder yang terlibat dalam Program BANGGA KENCANA* adalah Persentase dari total stakeholder yang diidentifikasi sebagai target atau potensial untuk terlibat dalam Program BANGGA KENCANA yang secara aktif berpartisipasi atau mendukung kegiatan program.

4). Indikator ke 4, Penghitungan *Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)* menggunakan pendekatan 3 Dimensi, 11 Indikator dan 17 Variabel. Langkah-langkah Penghitungan : 1). Menghitung Nilai Agregasi masing-masing variabel di level Kabupaten/Kota; 2). Menghitung Skor disetiap dimensi; 3). Menghitung iBangga.

iBangga bernilai 0-100, dengan katagori sebagai berikut :

- Nilai iBangga di bawah 40, maka status pembangunan keluarga kurang baik (Rentan)
- Nilai iBangga antara 40-70, maka status pembangunan keluarga cukup baik (berkembang)
- Nilai iBangga di atas 70, maka status pembangunan keluarga baik (tangguh).

Tenggarong, Januari 2025

Pt. Kepala Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana,


DAFIP HARYANTO, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19701024 199003 1 001



3. Rencana Aksi

RENCANA AKSI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2025

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI				ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB
				INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	I		II	III	IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah							33.924.811.101						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA			Nilai SAKIP DPPKB	Angka	85,55	14.144.206.101	x	x	x	x	Kadis/Sekretaris	
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan Evaluasi Kinerja DPPKB	Jumlah Dokumen perencanaan dan Evaluasi Kinerja DPPKB	Dokumen	144	1.000.000.000	x	x	x	x		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	450.000.000	x	x	x	x	Kadis/Sekretaris	
			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	50.000.000	o	o	x	x		
			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah Yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	1	250.000.000	o	x	x	o		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Laporan	12	50.000.000	x	x	x	x		
			Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	1	50.000.000	x	o	o	o		

			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen/Laporan	40/12	150.000.000	x	x	x	x	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	12,00	8.485.425.215	x	x	x	x	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan per bulan	Orang/Bulan	55/14	8.185.425.215	x	x	x	x	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	1	25.000.000	o	o	x	x	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/Semester an SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Laporan	12	250.000.000	x	x	x	x	
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan	1	25.000.000	x	x	x	x	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah dokumen barang milik daerah(BMD) pada perangkat daerah	Dokumen	1,0	105.000.000	x	x	x	x	
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan barang milik daerah yang direkonsiliasi	Dokumen	1	25.000.000	x	x	x	x	
			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan barang milik daerah yang dilakukan penatausahaan	Laporan	2	50.000.000	x	x	x	x	
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	30.000.000	x	x	x	x	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10	50.000.000	x	x	x	x	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	Orang	10	50.000.000	x	x	x	x	



				Peraturan Perundang-Undangan								
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	464.629.800	x	x	x	x	
			Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis	3	100.000.000	x	x	x	x	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis barang logistik yang disediakan	Jenis/Paket	2	60.000.000	x	x	x	x	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Barang Cetakan dan Pengadaan	Lembar	26.862	19.999.800	x	x	x	x	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Koran	Eksemplar	440	9.630.000	x	x	x	x	
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket	Paket	5	175.000.000	x	x	x	x	
			Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi	Laporan	30	200.000.000	x	x	x	x	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	75.000.000	o	x	x	x	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Pengadaan Barang pada DPPKB	Unit	23	150.000.000	o	o	o	x	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	15	75.000.000	o	o	o	x	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	15	75.000.000	o	o	o	x	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	Bulan	12	1.834.920.508	x	x	x	x	

			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	414.888.200	x	x	x	x	
			Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	75.000.000	x	x	x	x	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.345.032.308	x	x	x	x	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Jumlah Barang Milik daerah	Unit	96	2.054.230.678	x	x	x	x	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	11	1.906.329.000	x	x	x	x	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	84	97.901.578	x	x	x	x	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	x	x	x	x	
Meningkatnya peran Stakeholder dalam Program BANGGA KENCANA	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			Cakupan Stakholder yang terlibat dalam Program KKBPK	45 Persen		6.426.495.000	x	x	x	x	Kabid/PPTK
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah	Tersediannya dokumen Pemaduan dan Sinkronisasi	Dokumen	1	300.000.000	o	o	x	x	



		Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian Kuantitas Penduduk	Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian Kuantitas Penduduk								
			Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/ Kota	Dokumen	1	75.000.000	0	0	x	x	
			Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Kegiatan	6	75.000.000	0	0	x	x	
			Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Dokumen	1	75.000.000	0	0	x	x	
			Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kegiatan	80	75.000.000	0	0	x	x	
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemetaan perkiraan pengendalian penduduk di kabupaten Kutai Kartanegara	Persen	70	6.126.495.000	x	x	x	x	

		Kabupaten/Kota										
			Pembinaan Dan Pengawasan Pencatatan Dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1	1	4.679.025.000	0	x	x	x	
			Penyusunan Profil Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Dokumen	100	100.000.000	0	0	x	x	
			Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1500	5.000	61.270.000	0	0	x	x	
			Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	3	714.340.000	0	0	x	x	
			Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	43	196.860.000	0	0	x	x	
Meningkatnya kesadaran ber-KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Dokumen	3	225.000.000	0	0	x	x	Kabid/PPTK
			Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Dokumen	1	150.000.000	0	0	x	x	
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	Terlaksananya kegiatan advokasi dan KIE	Event	5	3.724.056.000	x	x	x	x	
			Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan	Organisasi	5	360.000.000	0	x	x	x	



				an, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja								
			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	2	337.716.000	o	x	x	x	
			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	1	373.000.000	x	x	x	x	
			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	22	2.453.340.000	x	x	x	x	
			Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar	Dokumen	5	200.000.000	x	x	x	x	

		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Ruang									
			Terlaksananya kegiatan operasional KB di Lapangan	Desa	237	931.750.000	x	x	x	x		
		Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan	6	130.000.000	x	x	x	x		
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kelompok	237	651.750.000	x	x	x	x		
		Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Organisasi	1	50.000.000	x	x	x	x		
		Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Unit	12	100.000.000	x	x	x	x		
		Pengendalian dan Pendistribusian KebutuhanAlat	Tersedianya alat, obat dan kontasepsi pada Fasilitas Kesehatan	Faskes	40	1.376.554.000	x	x	x	x		



		dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota											
			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Laporan	42	938.054.000	o	x	x	x		
			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	1	113.500.000	x	x	x	x		
			Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	3	75.000.000	x	x	x	x		
			Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitas dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Kab/Kota	12	100.000.000	x	x	x	x		
			Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan	6	150.000.000	x	x	x	x		
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-		Cakupan ORMAS/POKJA	Persen	60	1.119.900.000	x	x	x	x		

		KB											
			Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kampung KB	38	100.000.000	x	x	x	x		
			Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT)	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Unit	48	523.500.000	x	x	x	x		
			Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	5	100.000.000	x	x	x	x		
Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan Keluarga	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Laporan	2	150.000.000	x	x	x	x		Kabid/PPTK
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Kampung KB bernilai baik	38	246.400.000	x	x	x	x		
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Be-KB	Cakupan ORMAS/POKJA	Persen	60	1.119.900.000	x	x	x	x		
			Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan	Kampung KB	38	100.000.000	x	x	x	x		



			Ber-KB	Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB									
			Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atas Stunting (DASHAT)	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Unit	48	523.500.000	x	x	x	x		
			Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	5	100.000.000	x	x	x	x		
			Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Laporan	2	150.000.000	o	x	o	x		
			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Kampung KB bernilai baik	38	246.400.000	x	x	x	x		
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan peran ORMAS dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persen	50	3.545.100.000	x	x	x	x		
			Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Laporan	68	175.000.000	x	x	x	x		
			Pendayagunaan Mitra	Jumlah Laporan	Laporan	4	150.000.000	x	x	x	x		

			Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)									
			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Organisasi	68	215.000.000	o	x	x	x		
			Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon Pus, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Laporan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon Pus, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	Laporan	12	1.574.100.000	x	x	x	x		

Pt. Kepala Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



4. Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2025



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Diponegoro No. 34 Telp. (0541) 661036 Fax 661787 Tenggarong Kode Pos 75514
Email : inspektorat@kukarkab.go.id Website : inspektorat.kukarkab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2024

NOMOR : B-329/ITDA/IP.II/700.1/11/2024
TANGGAL : 18 November 2024

IKHTISAR EKSEKUTIF

Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah dan khususnya untuk memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP, dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 diperoleh nilai **61,24** dengan kategori **B (Baik)**. Kategori "**Baik**" menginterpretasikan bahwa terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.